BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

b. bahwa dengan mempertimbangkan pentingnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perkembangan wilayah sekitar

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan pariwisata di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika agar dapat berjalan komprehensif dan berfungsi secara selaras atau tidak saling kontraproduktif;

c. bahwa dalam rangka mengarahkan perkembangan wilayah sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun rencana rinci tata ruang bagi wilayah sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 2 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5551);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA TAHUN 2021 – 2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
18. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan berbasis pada sektor pariwisata, baik itu wisata bahari, MICE *(Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)*, maupun wisata budaya.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis daerah yang akan atau

perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah Kabupaten/Kota.

21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Hutan Lindung adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan ekakarosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagia kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung anatara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hal, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
34. Sub-Zona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
35. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
36. Zona Konservasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat

maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.

37. Sub-Zona Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
38. Zona Perumahan adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
39. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
40. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
41. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
42. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
43. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
44. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang

difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

45. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya, dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
47. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
48. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
49. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
50. Sub-Zona Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baikpada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
51. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
52. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi daya yang dikembangkan untuk

mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

53. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES), Tempat Evakuasi Akhir (TEA), Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pengembangan Nuklir dan Pergudangan.
54. Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri *(escape building)* dan berfungsi sebagai tempat berkumpul *(assembly point)* penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
55. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas – batas tertentu yang berfungsi untuk pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang bersal dari limbah – limbah domestik, industri, maupun komerisl dan lain-lainnya.
56. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas – batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
57. Zona Campuran adalah peruntukan lahan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu.
58. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan lahan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu dengan batasan intensitas menengah/sedang.
59. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

60. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan *(overlay)* dengan zona lainnya.
61. Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
62. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
64. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana tembok luar atau tiang struktur bangun dengan atap.
66. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb *(building line)*.

67. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
   a. tujuan penetapan WP Sekitar KEK Mandalika;
   b. rencana Struktur Ruang;
   c. rencana Pola Ruang;
   d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
   e. peraturan Zonasi; dan
   f. kelembagaan.

(2) Ruang Lingkup WP Sekitar KEK Mandalika terdiri atas:
   a. delineasi WP Sekitar KEK Mandalika ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 3.780,97 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan tujuh) hektar, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi;
   b. delineasi WP Sekitar KEK Mandalika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
      1. sebagian wilayah Desa Kuta dengan luas 1.605,08 (seribu enam ratus lima koma nol delapan) hektar;
      2. sebagian wilayah Desa Prabu dengan luas 577,04 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma nol empat) hektar;
      3. sebagian wilayah Desa Mertak dengan luas 701,11 (tujuh ratus koma satu satu) hektar;

4. sebagian wilayah Desa Sengkol dengan luas 171,05 (seratus tujuh puluh satu koma nol lima) hektar;
5. sebagian wilayah Desa Rembitan dengan luas 419,97 (empat ratus sembilan belas koma sembilan tujuh) hektar; dan
6. sebagian wilayah Desa Sukadana dengan luas 306,73 (tiga ratus enam koma tujuh tiga) hektar.

c. delineasi WP Sekitar KEK Mandalika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibagi menjadi 5 (lima) SWP, terdiri atas:
1. SWP A, mencakup sebagian wilayah Desa Prabu dan sebagian wilayah Desa Kuta dengan luas 744,23 (tujuh ratus empat puluh empat koma dua tiga) hektar, pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
2. SWP B, mencakup sebagian wilayah Desa Kuta, sebagian wilayah Desa Prabu dan sebagian Desa Rembitan dengan luas 757,94 (tujuh ratus lima puluh tujuh koma sembilan empat) hektar, pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
3. SWP C, mencakup sebagian wilayah Desa Kuta, sebagian wilayah Desa Rembitan dan sebagian wilayah Desa Sukadana dengan luas 1.155,89 (seribu seratus lima puluh lima koma delapan sembilan) hektar, pada Blok C.1, dan Blok C.2;
4. SWP D, mencakup sebagian wilayah Desa Kuta, sebagian wilayah Desa Sukadana dan sebagian wilayah Desa Mertak dengan luas 951,87 (sembilan ratus lima puluh satu koma delapan tujuh) hektar, pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
5. SWP E, mencakup sebagian wilayah Desa Sengkol dengan luas 171,05 (seratus tujuh puluh satu koma nol lima) hektar, pada Blok E.1.

d. delineasi WP Sekitar KEK Mandalika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Penataan WP RDTR Sekitar KEK Mandalika bertujuan untuk mewujudkan kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Lombok Bagian Selatan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dengan berlandaskan nilai – nilai kearifan lokal.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Rencana Struktur Ruang WP Sekitar KEK Mandalika meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi; dan
   c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang Sekitar KEK Mandalika digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan;
   b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan; dan

c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP B pada Blok B.2.

(3) SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. SPPKP Mertak yang terdapat di SWP D pada Blok D.3; dan
   b. SPPKP Gerupuk yang terdapat di SWP E pada Blok E.1.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
   b. Pusat Lingkungan Desa.

(5) Pusat Lingkungan Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP B pada Blok B.2 dan SWP D pada Blok D.1.

(6) Pusat Lingkungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
   a. Pusat Lingkungan Desa Prabu yang terdapat di SWP A pada Blok A.1;
   b. Pusat Lingkungan Desa Kuta yang terdapat di SWP C pada Blok C.1; dan
   c. Pusat Lingkungan Desa Mertak yang terdapat di SWP D pada Blok D.2.

(7) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga
## Rencana Jaringan Transportasi

### Pasal 6

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jalan umum;
   b. jembatan; dan
   c. halte.

(2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 7

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jalan arteri primer;
   b. jalan kolektor primer; dan
   c. jalan lingkungan primer.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ruas jalan *By pass* BIL – Mandalika terdapat di SWP D.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ruas jalan Sengkol-Kuta terdapat di SWP B dan SWP C;
   b. ruas jalan Sp. Pengantap – Montong Ajan – Kuta terdapat di SWP A dan SWP B;
   c. ruas jalan Kuta – Keruak terdapat di SWP B, SWP C, dan SWP D;
   d. ruas jalan Rembitan – Prabu terdapat di SWP A dan SWP B;
   e. ruas jalan Bengkang – Songgong terdapat di SWP D; dan
   f. ruas jalan Poros Lenser - Nandus terdapat di SWP C dan SWP D.

(4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

Paragraf 2

Jembatan

Pasal 8

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. SWP B pada Blok B.1;
b. SWP C pada Blok C.1; dan
c. SWP D pada Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 3

Halte

Pasal 9

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B pada Blok B.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan air minum;
d. rencana pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
e. rencana jaringan persampahan;
f. rencana jaringan drainase; dan
g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdapat di SWP B dan SWP C.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E; dan
   b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. gardu induk, terdapat di SWP C pada Blok C.2;
   b. gardu hubung, terdiri atas:
      1. SWP B pada Blok B.1;
      2. SWP D pada Blok D.3; dan
      3. SWP E pada Blok E.1.
   c. gardu distribusi, terdiri atas:
      1. SWP B pada Blok B.2;
      2. SWP C pada Blok C.2;
      3. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.4; dan
      4. SWP E pada Blok E.1.

(5) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS), terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP D, dan SWP E.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. unit air baku, berupa jaringan transmisi air baku, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E; dan
   b. unit distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di SWP C, SWP D, dan SWP E.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penangkap mata air, terdapat di SWP B pada Blok B.2.

(4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 14

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa subsistem pengolahan terpusat.
(3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di SWP C pada Blok C.1.
(4) Rencana pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
    a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
    b. tempat penampungan sementara (TPS).
(2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP D pada Blok D.2.

(3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. SWP A pada Blok A.2;
   b. SWP B pada Blok B.1;
   c. SWP C pada Blok C.1;
   d. SWP D pada Blok D.4; dan
   e. SWP E pada Blok E.1.

(4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 16

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder; dan
   c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir.

(6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi;
   c. jalur sepeda; dan
   d. jalur pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP E.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. titik kumpul, terdiri atas:
      1. SWP B pada Blok B.2; dan
      2. SWP B pada Blok B.3.
   b. tempat evakuasi sementara, terdiri atas:
      1. SWP A pada Blok A.1;
      2. SWP C pada Blok C.1; dan
      3. SWP D pada Blok D.3

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B, SWP C, dan SWP D.

(5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP B, SWP C, dan SWP D.

(6) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Rencana Pola Ruang WP Sekitar KEK Mandalika, meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang WP Sekitar KEK Mandalika digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
d. Zona Konservasi dengan kode KS.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung

Pasal 20

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dengan luas 438,53 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima tiga) hektar, terdiri atas:

a. SWP B pada Blok B.4; dan

b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan luas 80,61 (delapan puluh koma enam satu) hektar, terdiri atas:

a. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
d. SWP E pada Blok E.1.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
    a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
    b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 19,17 (sembilan belas koma satu tujuh) hektar, terdiri atas:
    a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
    b. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar, terdiri atas:
    a. SWP B pada Blok B.2; dan
    b. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.

(4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektar, terdiri atas:
   a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
   b. SWP B pada Blok B.3;
   c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
   d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
   e. SWP E pada Blok E.1.

(5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 4,86 (empat koma delapan enam) hektar, terdiri atas:
   a. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3;
   b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
   c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 5

Zona Konservasi

Pasal 23

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, yaitu Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas 445,98 (empat ratus empat puluh lima koma sembilan delapan) hektar, terdapat di SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Zona Pertanian dengan kode P;

b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. Zona Pariwisata dengan kode W;
d. Zona Perumahan dengan kode R;
e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
f. Zona Campuran dengan kode C;
g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 25

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas 1.020,47 (seribu dua puluh koma empat tujuh) hektar, meliputi:
a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 245,52 (dua ratus empat puluh lima koma lima dua) hektar, terdiri atas:
a. SWP A pada Blok A.2;
b. SWP C pada Blok C.1; dan
c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

(3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 774,95 (tujuh ratus tujuh puluh empat koma sembilan lima) hektar, terdiri atas:
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
d. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.4; dan
e. SWP E pada Blok E.1.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas 1,44 (satu koma empat empat) hektar, terdapat di SWP C pada Blok C.2.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan luas 992,62 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma enam dua) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
e. SWP E pada Blok E.1.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dengan luas 636,84 (enam ratus tiga puluh enam koma delapan empat) hektar, meliputi:
    a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 489,02 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol dua) hektar, terdiri atas:
    a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
e. SWP E pada Blok E.1.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 114,57 (seratus empat belas koma lima tujuh) hektar, terdiri atas:
a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
b. SWP B pada Blok B.3;
c. SWP C pada Blok C.2; dan
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 33,25 (tiga puluh tiga koma dua lima) hektar, terdiri atas:
a. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
b. SWP D pada Blok D.3.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, yaitu Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, dengan luas 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) hektar, terdiri atas:
a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
e. SWP E pada Blok E.1.

Paragraf 7

Zona Campuran

Pasal 30

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, yaitu Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.4.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dengan luas 20,04 (dua puluh koma nol empat) hektar, meliputi:
   a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
   b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 16,07 (enam belas koma nol tujuh) hektar, terdapat di SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4.
(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dengan luas 4,85 (empat koma delapan lima) hektar, terdiri atas:

a. SWP B pada Blok B.2; dan
b. SWP E pada Blok E.1.

Paragraf 10

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.2.

Paragraf 11

Zona Peruntukkan Lainnya

Pasal 34

Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, yaitu Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4, dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar, terdapat di SWP C pada Blok C.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Sekitar KEK Mandalika.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
    b. program prioritas pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

(1) Pelaksanaan KKPR Sekitar KEK Mandalika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

(1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. program pemanfaatan ruang prioritas;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
   d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau

b. Swasta dan Masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program prioritas pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan RDTR Sekitar KEK Mandalika, meliputi:

a. tahapan pertama pada periode tahun 2021 – 2024;

b. tahapan kedua pada periode tahun 2025 – 2029;

c. tahapan ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;

d. tahapan keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan

e. tahapan kelima pada periode tahun 2040 – 2041.

(7) Indikasi program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII
## PERATURAN ZONASI
### Bagian Kesatu
### Umum
### Pasal 38

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e, berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi terdiri atas:

a. aturan dasar; dan/atau
b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 39

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. aturan dasar Zona Lindung; dan
b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 40

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jenis kegiatan dan penggunaan lahan; dan
b. ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan.

(2) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
2. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
3. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
4. Zona Konservasi dengan kode KS;
5. Zona Pertanian dengan kode P;
6. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
7. Zona Pariwisata dengan kode W;

8. Zona Perumahan dengan kode R;
9. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
10. Zona Campuran dengan kode C;
11. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
12. Zona Perkantoran dengan kode KT;
13. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
14. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.

(3) Ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperolehkan dengan kode I merupakan ketegori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau masyarakat dengan pemerintah daerah melaui rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode T1;
    2. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada intensitas ruang yang terdiri dari KDB, KLB, KDH, Jarak Bebas, Ketinggian Bangunan berdasarkan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode T2; dan
    3. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada jumlah tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode T3.
c. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak bersyarat dengan kode B merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang

berlaku AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode B1;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu lintas yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode B2; dan
3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan biaya dampak pembangunan *(development impact fee)* yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode B3.

d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan kode X merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub-zona, tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimal; dan
   d. luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang,

tercantum pada Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. TB maksimum;
    b. GSB minimum; dan
    c. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Tabel Tata Bangunan, tercantum pada lampiran V.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    a. jalur pejalan kaki;
    b. jaringan jalan;
    c. ruang terbuka hijau;
    d. ruang terbuka non hijau;
    e. utilitas perkotaan;
    f. prasarana lingkungan; dan
    g. ketentuan lainnya yang diperlukan.
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana, tercantum pada lampiran V.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 44

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
d. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS.

Pasal 45

(1) Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
    a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
        1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
        2. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan wisata alam; dan
        3. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
        1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
        2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
        3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
    c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.
    d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
        1. ruang terbuka;
        2. rambu jalur evakuasi bencana; dan
        3. pos penjaga hutan.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 46

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan wisata alam, halte/shelther, reservoar, intake, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, WTP, menara telekomunikasi, tempat pelelangan ikan dan tambak; dan
   3. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. ruang terbuka;
   2. rambu jalur evakuasi bencana;
   3. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah; dan
   4. prasarana dan sarana harus memiliki aksesibilitas berupa jalan masuk yang memudahkan semua orang dan penyandang disabilitas.

Pasal 47

(1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:
   a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
   b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
   c. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
   d. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
      1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
      2. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan kegiatan wisata alam, menara telekomunikasi, gardu listrik; dan
      3. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
      1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
      2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
      3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
   c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
      1. jalur hijau;
      2. lampu penerangan;
      3. tempat sampah;
      4. rambu jalur evakuasi bencana; dan
      5. sumur biopori.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan lapangan parkir;
    3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan wisata alam, wisata buatan, lapangan olah raga, gardu listrik, dan bisnis lapangan olahraga, TPS, dan menara telekomunikasi; dan
    4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur pejalan kaki (sidewalk);
    2. jogging track;
    3. tempat sampa;
    4. musholla;
    5. MCK;
    6. area parkir;
    7. sumur biopori; dan
    8. hidran.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

2. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
   3. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen.

c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur hijau;
   2. tempat sampah;
   3. MCK; dan
   4. area parkir.

(5) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
   2. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. lampu penerangan;
2. tempat sampah;
3. rambu jalur evakuasi bencana; dan
4. sumur biopori.

Pasal 48

(1) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d yaitu Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan wisata alam dan menara telekomunikasi; dan
3. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur hijau;

2. lampu penerangan;
3. tempat sampah;
4. rambu jalur evakuasi bencana; dan
5. sumur biopori.

(3) ketentuan pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Wisata Alam mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 49

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
b. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
d. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
e. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
f. aturan dasar Zona Campuran dengan kode C;
g. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
h. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
i. aturan dasar Zona Pengolahan Persampahan dengan kode PP; dan
j. aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Pasal 50

(1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas:
   a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
   b. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan rumah pompa, TPU (Tempat Pemakaman Umum) dan peternakan;
3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah sewa/kost, rumah adat, wisata alam, lapangan olahraga, stadion, gedung pertemuan, TPS3R, TPS, reservoar pemadam kebakaran, reservoar, menara telekomunikasi, gardu listrik, pembangkitan listrik, taman kota dan tambak; dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. jaringan irigasi atau prasarana lainnya;
   3. jalan usaha tani;
   4. rambu jalur evakuasi bencana; dan
   5. area parkir.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan kantor polisi, lapangan olahraga, rumah pompa, TPU (Tempat Pemakaman Umum), dan peternakan;
3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah sewa/kost, rumah adat, kantor instansi kabupaten, villa/bungalow, wisata alam, gedung olahraga, stadion, gedung pertemuan, halte/shelther, TPS3R, TPS, pengolahan sampah/limbah, reservoar pemadam kebakaran, reservoar, menara telekomunikasi, gardu listrik, pembangkitan listrik, taman kota, tempat pelelangan ikan dan tambak; dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
c. ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. jaringan irigasi atau prasarana lainnya;
   3. jalan usaha tani;
   4. rambu jalur evakuasi bencana; dan
   5. area parkir.

Pasal 51

Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
   3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 30 (tiga puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 30 (tiga puluh) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 30 (tiga puluh) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
   3. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
   4. area parkir.

Pasal 52

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan panti, grosir, bank, koperasi, pegadaian, asuransi, travel dan pengiriman barang, bengkel, jasa jahit pakaian, lembaga bimbingan belajar, rental kendaraan, jasa printing, sablon, periklanan, cetak foto, pergudangan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, bidan, intake dan iklan/reklame;
   3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah sewa/kost, rumah adat, mall / plaza, SPBU, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, bisnis lapangan olahraga, bioskop, wisata budaya, industri kecil, playgroup/pendidikan anak usia dini, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, pondok pesantren, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, dokter umum, dokter spesialis, apotek, lapangan olahraga, stadion, museum, halte/shelther, TPS, pengolahan sampah/limbah, WTP, reservoar, menara telekomunikasi, dan gardu listrik, supermarket, stadion, musholla, masjid, gereja, pura, klenteng; dan
   4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
   2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
   3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 16 (enam belas) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
   3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 5,5 (lima koma lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar maksimum 3 (tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
   2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
   3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
   4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
   5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
   6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
   7. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; dan
   8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 53

(1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:
   a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
   b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
   c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
      1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
      2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan panti, minimarket, warung/kios, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, koperasi, pegadaian, salon, travel dan pengiriman barang, bengkel, jasa jahit pakaian, lembaga bimbingan belajar, rental kendaraan, jasa printing, sablon, periklanan, dan cetak foto, *playgroup*/pendidikan anak usia dini, TK, dokter umum, dokter spesialis, bidan, area bermain / play ground, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, intake, dan jalur hijau, museum;
      3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan mall / plaza, rumah makan, cafe, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, hotel melati/losmen/wisma, *home stay/guest house*, wisata buatan, wisata budaya, industri kecil, SD/MI, SLTP/MTS, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, apotek, lapangan olahraga, gedung olahraga, gedung pertemuan, halte/shelther, TPS, pengolahan sampah/limbah, reservoar, menara telekomunikasi, gardu listrik; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 80 (depalan puluh) persen;
   2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
   3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
   4. Luas kaveling minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 5 (lima) meter.
   3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 8-10 (delapan sampai sepuluh) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
   2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
   3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
   4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;

5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
9. setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan panti, warung/kios, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, koperasi, atm, pegadaian, salon, travel dan pengiriman barang, bengkel, jasa jahit pakaian, lembaga bimbingan belajar, rental kendaraan, jasa printing, sablon, periklanan, cetak foto, *playgroup*/pendidikan anak usia dini, TK, SD/MI, SLTP/MTS, dokter umum, dokter spesialis, bidan, area bermain / *play ground*, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, intake, dan jalur hijau, minimarket, kantor bisnis dan pemasaran properti;
   3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan mall / plaza, rumah makan, cafe, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, hotel melati/losmen/wisma, *home stay/guest house*, wisata buatan, industri kecil, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, apotek, lapangan

olahraga, gedung olahraga, gedung pertemuan, halte/shelther, TPS, pengolahan sampah/limbah, reservoar, menara telekomunikasi, dan gardu listrik; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 75 (tujuh puluh lima) persen;
   2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
   3. KDH minimal 15 (lima belas) persen; dan
   4. Luas Kaveling minimum 90 (sembilan puluh) meter persegi.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
   3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 4,5 (empat koma lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;

2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
9. setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan panti, minimarket, warung/kios, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, koperasi, ATM, pegadaian, salon, travel dan pengiriman barang, bengkel, kantor bisnis Dan pemasaran properti, lembaga bimbingan belajar, dokter umum, dokter spesialis, bidan, area bermain / *playground*, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, intake, dan jalur hijau;
   3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan mall / plaza, rumah makan, cafe, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, hotel melati/losmen/wisma, *home stay/guest house*, wisata buatan,

industri kecil, *playgroup*/pendidikan anak usia dini, tk, SD/MI, sltp/mts, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, apotek, lapangan olahraga, gedung olahraga, gedung pertemuan, halte/shelther, TPS, pengolahan sampah/limbah, reservoar, menara telekomunikasi, gardu listrik, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
   2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
   3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
   4. Luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter; dan
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
   3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 4,5 (empat koma lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
9. setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

Pasal 54

(1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, yaitu Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
      1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan pegadaian, area bermain / *play ground*, iklan/reklame, dan jalur hijau;
3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan mall / plaza, puskesmas, puskesmas pembantu, halte/shelther, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, WTP, menara telekomunikasi, gardu listrik, dan TPU (Tempat Pemakaman Umum); dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter; dan
2. GSB minimum, meliputi:
   a. untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
   b. untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
   c. untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 5 (lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua

sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;

2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan
8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

Pasal 55

(1) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi aturan dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/sedang dengan kode C-2.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan showroom, grosir, bank, koperasi, ATM, pegadaian, asuransi, salon, travel dan pengiriman barang, bengkel, kantor bisnis dan pemasaran properti, lembaga bimbingan belajar,

pergudangan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, iklan/reklame, dan jalur hijau;

3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah sewa/kost, rumah adat, mall / plaza, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, hotel melati/losmen/wisma, home stay/guest house, bioskop, industri kecil, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, apotek, gedung pertemuan, halte/shelther, pengolahan sampah/limbah, WTP, gardu listrik, menara telekomunikasi, supermarket, musholla, masjid, gereja, pura, dan klenteng; dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
   2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
   3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.

3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 4,5 (empat koma lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
   2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
   3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
   4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
   5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
   6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
   7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap;
   8. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan
   9. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 56

(1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, terdiri atas:
   a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan pasar tradisional, area bermain/*playground*, iklan/reklame, dan jalur hijau;
   3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah sewa/kost, rumah adat, SPBU, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, hotel bintang, hotel melati/losmen/wisma, *home stay/guest house*, taman hiburan, industri menengah, industri kecil, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pondok pesantren, rumah sakit, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, dokter umum, dokter spesialis, apotek, gedung olahraga, gedung pertemuan, halte/shelther, TPS, TPS3R, WTP, gardu listrik, dan tempat pelelangan ikan, dan gardu listrik, taman hiburan, dan tempat pelelangan ikan; dan
   4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
   3. KDH minimal 15 (lima belas) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:

a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;

b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan

c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.

3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 5 (lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap;
8. tersedia prasarana pembuangan limbah domestic sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
9. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan pasar tradisional, area bermain/*play ground*, iklan/reklame, dan jalur hijau;
   3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah sewa/kost, rumah adat, SPBU, kantor instansi kabupaten, kantor polisi, hotel melati/losmen/wisma, home stay/guest house, taman hiburan, industri menengah, industri kecil, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pondok pesantren, balai pengobatan / klinik / poliklinik, posyandu, dokter umum, dokter spesialis, apotek, gedung olahraga, gedung pertemuan, halte/shelther, TPS, WTP, gardu listrik, dan tempat pelelangan ikan; dan
   4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
   2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
   3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:

a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;

b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan

c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.

3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 5 (lima) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap;
8. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
9. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 57

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan rumah makan, bank, koperasi, asuransi, kantor bisnis dan pemasaran properti, lembaga bimbingan belajar, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, iklan/reklame, dan jalur hijau;
   3. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan mall/plaza, hotel melati/losmen/wisma, home stay/guest house, puskesmas, dan puskesmas pembantu, dokter umum, dokter spesialis, halte/shelther, WTP, dan gardu listrik; dan
   4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
   3. KDH minimal 15 (lima belas) persen.
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter; dan
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan

c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.

3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 5 (lima) meter.

d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan
8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 58

Aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas pada kegiatan rumah makan, bank, koperasi, asuransi, kantor bisnis dan pemasaran

properti, lembaga bimbingan belajar, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, iklan/reklame, dan jalur hijau; dan

3. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
   2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
   3. KDH minimal 15 (lima belas) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
   2. GSB minimum, meliputi:
      a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
      b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
      c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
   3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 4 (empat) meter.

d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
   2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
   3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
   4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;

5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan
8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 59

(1) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j, yaitu Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
(2) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
        1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
        2. pemanfaatan bersyarat pada kegiatan TPS3R; dan
        3. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
        1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
        2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
        3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
    c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

1. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
2. GSB minimum, meliputi:
   a) untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter, GSB minimum adalah 20 (dua puluh) meter;
   b) untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan 15 (lima belas) meter, GSB minimum adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter; dan
   c) untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan 11 (sebelas) meter, GSB minimum adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter.
3. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 4 (empat) meter.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
   2. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;
   3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;
   4. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimum 3 meter dari garis tepi jalan;
   5. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimum 4 meter;
   6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
   7. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan
   8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 60

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona/Sub-Zona di dalam aturan dasar.

(2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. kawasan rawan bencana;
   b. tempat evakuasi bencana; dan
   c. kawasan resapan air.

(3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana, Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana dan Ketentuan Khusus resapan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.d.1, VI.d.2, VI.d.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

(1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana abrasi;
   b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tanah longsor;
   c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
   d. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami;
   e. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir; dan
   f. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir bandang.

(2) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:
   a. Zona Pariwisata dengan kode W;

b. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
c. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
d. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

(3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pembangunan bangunan pelindung pantai;
b. menyediakan resapan air pada setiap blok;
c. pengelolaan sumber daya (ekosistem) yang ada di kawasan pesisir;
d. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
e. persyaratan pembanguanan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
f. intensitas pemanfaatan ruang yang dibatasi; dan
g. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia diadikan *shelter, meeting point.*

(4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:
a. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
   1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
   2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
b. Zona Pariwisata dengan kode W Sub-Zona Pariwisata;
c. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
   1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.

(5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
b. pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan;
c. perlu dihindari bangunan konstruksi dengan beban >2 ton/30cm², kecuali dilengkapi dengan teknologi perkuatan lereng dan pengendalian sistem drainase lereng;
d. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
e. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
f. persyaratan pembanguanan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
g. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
h. intensitas pemanfaatan ruang yang dibatasi; dan
i. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia diadikan *shelter, meeting point.*

(6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:

a. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
   1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;

2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;

b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik;

c. Zona Pariwisata dengan kode W;

d. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;

e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

f. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;

g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

h. Zona Perkantoran dengan kode KT;

i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan

j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4.

(7) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan resapan air pada setiap blok;

b. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana); dan

c. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;

d. persyaratan pembanguanan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
e. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
f. intensitas pemanfaatan ruang yang dibatasi;
g. pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada rawan gempa bumi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya non terbangun; dan
h. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia diadikan *shelter, meeting point.*

(8) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:
a. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
   1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
   2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
b. Zona Pariwisata dengan kode W;
c. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
   4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
   5. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
f. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
g. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4.

(9) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. membuat kode bangunan, desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan, penahan dinding pantai;
b. persyaratan pembanguanan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat; dan
c. pengelolaan sumberdaya (ekosistem) yang ada di kawasan pesisir.

(10) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:
a. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
   1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
   2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik;
c. Zona Pariwisata dengan kode W;
d. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
   1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
   2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
   3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
f. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
h. Zona Perkantoran dengan kode KT;

(11) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
b. KDH harus ditambahakan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti

standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);

c. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
d. persyaratan pembanguanan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
e. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
f. pembuatan tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung;
g. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengikuti ketentuan umum;
h. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil;
i. pengaturan ketinggian lantai bangunan; dan
j. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil.

(12) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:

a. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
    1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
    2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik;
c. Zona Pariwisata dengan kode W;
d. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
    1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
    3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.

(13) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
b. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
c. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
d. persyaratan pembanguanan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
e. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
f. pembuatan tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung;
g. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengikuti ketentuan umum;
h. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil;
i. pengaturan ketinggian lantai bangunan; dan
j. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil.

Pasal 62

(1) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, merupakan kawasan yang bertampalan dan atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana terhadap Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU.

(2) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimum 10 (sepuluh) menit, untuk bencana tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencanna sekitar 400 – 600 (empat ratus sampai enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
c. lokasi tempat evakuasi bencana jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesbilitas tinggi);
e. lokasi tempat evakuasi bencana harus jauh dari tempat pecahnya gelombang tsunami;
f. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
g. bangunan eksisting berada diluar kawasan rawan bencana;
h. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
i. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.

(3) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

(1) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, bertampalan dengan peruntukan pola ruang sebagai berikut:
a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
b. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;

c. Zona Pariwisata dengan kode W; dan

d. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ketentuan sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kawasan resapan air;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limapasan air hujan dan kegiatan yang tidak menggaanggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terdapap air dan kegiatan yang menggangu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimu meliputi penyediaan sumur resapan, kolam retensi, situ, danau, embung dan /atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

f. penerapan prinsip penyediaan setiap bangunan tidak mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai *(Zero Delta Q Policy)* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Paragraf 4

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 64

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 65

(1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaiakan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam RDTR.

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perubahan penggunaan lahan (perubahan mikro);
   b. perubahan intensitas pemanfaatan lahan;
   c. perubahan ketentuan tata massa bangunan; dan
   d. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan blok *(rezoning)*.

(3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
   a. terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
   b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaanya;
   c. permohonan atau ususlan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan
   d. terjadi kondisi *force majeru* yang berupa bencana alaam luar biasa dan kejadian perang.

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. kajian AMDAL, UKL-UPL atau SPPL; dan
   b. persetujuan masyarakat sekitar.

Pasal 66

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang

memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan tujuan penataan WP;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana detail tata ruang;
c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(4) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna lahan pada zona bonus dan penggiat tertib tata ruang terdiri atas:

a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Sekitar KEK Mandalika, yaitu dalam bentuk sebagai berikut:
    1. pembebasan seluruh biaya pengurusan izin pemanfaatan ruang dan pengalihan hak atas tanah;
    2. pembebasan pajak bumi dan bangunan maksimum selama 5 (lima) tahun;
    3. pembebasan biaya penyambungan listrik dan air bersih;
    4. penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
    5. pelibatan pada event promosi di dalam dan luar negeri.

(5) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan Sekitar KEK Mandalika, yaitu dalam bentuk sebagai berikut:
   1. tambahan pajak bumi dan bangunan maksimum sebesar 100 (seratus) persen;
   2. tambahan seluruh biaya retribusi maksimum sebesar 100 (seratus) persen;
   3. tambahan biaya penyambungan listrik dan air bersih; dan
   4. kewajiban mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan pada zona sekitar Taman Wisata Alam dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kegiatan pada zona rawan bencana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 67

(1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik zona dan arah penataan ruang.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang dengan tujuan memberikan fleksibilitas penerapan Peraturan Zonasi pada Zona atau Sub-Zona.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. *transfer development right;*

b. bonus *zoning;* dan

c. zona pengendalian pertumbuhan.

Pasal 68

(1) *Transfer development right* dengan kode (k) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a, merupakan teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensistas yang lebih tinggi.

(2) *Transfer development right* dengan kode (k) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 dengan luas 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan nol) hektar;

b. Zona Pariwisata dengan kode W dengan luas 367,05 (tiga ratus enam puluh tujuh koma nol lima) hektar; dan

c. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 dengan luas 102,10 (seratus dua koma satu nol) hektar;
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektar; dan
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 dengan luas 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) hektar.

(3) Luas pemenuhan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 dengan luas 166,80 (seratus enam puluh enam koma delapan nol) hektar;

b. Zona Pariwisata dengan kode W dengan luas 67,27 (enam puluh tujuh koma dua tujuh) hektar; dan

c. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 dengan luas 37,11 (tiga puluh tujuh koma satu satu) hektar;

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 dengan luas 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) hektar; dan

(4) *Transfer development right* dengan kode (k) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu blok;
b. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam TPZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
c. pengalihan luas lantai bangunan hanya dilakukan 1 (satu) kali
d. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai bangunan dan menerima pengalihan luas lantai bangunan tidak memperoleh pelampauan KLB;
e. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai bangunan kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih nilai KLB tidak dapat dialihkan; dan
f. pengalihan luas lantai bangunan dapat dilakukan pada zona dalam suatu area perencanaan terpadu dan kompak, dengan ketentuan meliputi:
    1. pada lahan perencanaan yang telah memiliki panduan Rancang Kota *Urban Design Guidelines* (UDGL), pengalihan nilai KLB harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota *Urban Design Guidelines* (UDGL); dan
    2. pengalihan nilai KLB antar lahan perencanaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

(1) *Bonus Zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (3) huruf b, merupakan teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan

(kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.

(2) *Bonus Zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 dengan luas 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) hektar;

b. Zona Pariwisata dengan kode W dengan luas 319,16 (tiga ratus sembilan belas koma satu enam) hektar;

c. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 dengan luas 64,38 (enam puluh empat koma tiga delapan) hektar;

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 dengan luas 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) hektar;

d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektar; dan

2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 dengan luas 1,50 (satu koma lima nol) hektar.

e. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 2,11 (dua koma satu satu) hektar.

(3) Luas pemenuhan RTH Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:

a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 dengan luas 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) hektar;

b. Zona Pariwisata dengan kode W dengan luas 81,81 (delapan puluh satu koma delapan satu) hektar; dan

c. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 dengan luas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektar; dan

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 dengan luas 17,17 (tujuh belas koma satu tujuh) hektar.

(4) *Bonus Zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna lahan pada zona bonus membantu penyediaan fasilitas publik, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, dan / atau menggunakan sumber daya lokal dapat diberikan bonus ruang berupa tambahan luas lantai dan jumlah lantai bangunan maksimum 50 (lima puluh) persen dari yang ditetapkan;

b. fasilitas publik terdiri atas ruang terbuka hijau publik, fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis;

c. teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada poin a yaitu:

1. pembangkitan listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan sarana penyulingan air laut untuk air bersih; dan
2. sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada poin a yaitu penggunaan bahan baku lokal lebih dari 70 (tujuh puluh) persen total nilai bahan baku dan penggunaan tenaga kerja.

d. penetapan bonus ruang dilakukan berdasarkan kebutuhan pengembangan zona budidaya, keseimbangan besaran bonus ruang dan nilai manfaat fasilitas publik, teknologi ramah lingkungan dan atau pemanfaatan sumberdaya lokal.

Pasal 70

(1) Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode (a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c, merupakan teknik pengaturan zonasi yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan.

(2) Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Zona Perdagangan dengan kode K berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 dengan luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar.

(3) Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi perdagangan dan jasa dibatasi setinggi-tingginya 50 (lima puluh) persen atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh lantai bangunan;
b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB setinggi-tingginya 50 (lima puluh) persen, KLB setinggi-tingginya 2,0 (dua koma nol), TB maksimum 4 (empat) lantai, KDH minimal 20 (dua puluh) persen, dan KTB setinggi-tingginya 50 (lima puluh) persen;
c. pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan;
d. pengaturan sistem inlet outlet sekurang-kurangnya setiap jarak 60 (enam puluh) meter dan membuka pagar antar persil;
e. menyediakan jalur pedestrian menerus dengan lebar sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter
f. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
g. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VIII
## KELEMBAGAAN

### Pasal 71

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Sekitar KEK Mandalika, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Sekitar KEK Mandalika.

(3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan;
b. perangkat daerah;
c. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;

d. asosiasi akademisi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
e. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati.

(4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukkan oleh Bupati.

(5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah bagi perwakilan asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d, dan e, berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. keanggotaannya dicabut.

## BAB IX
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 72

(1) Jangka waktu RDTR Sekitar KEK Mandalika adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Sekitar KEK Mandalika dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang RDTR Sekitar KEK Mandalika Tahun 2021-2041 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbutkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau;

(6) Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang RDTR Sekitar KEK Mandalika Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
c. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan

dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

ditetapkan di Praya
pada tanggal, 10 Desember 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

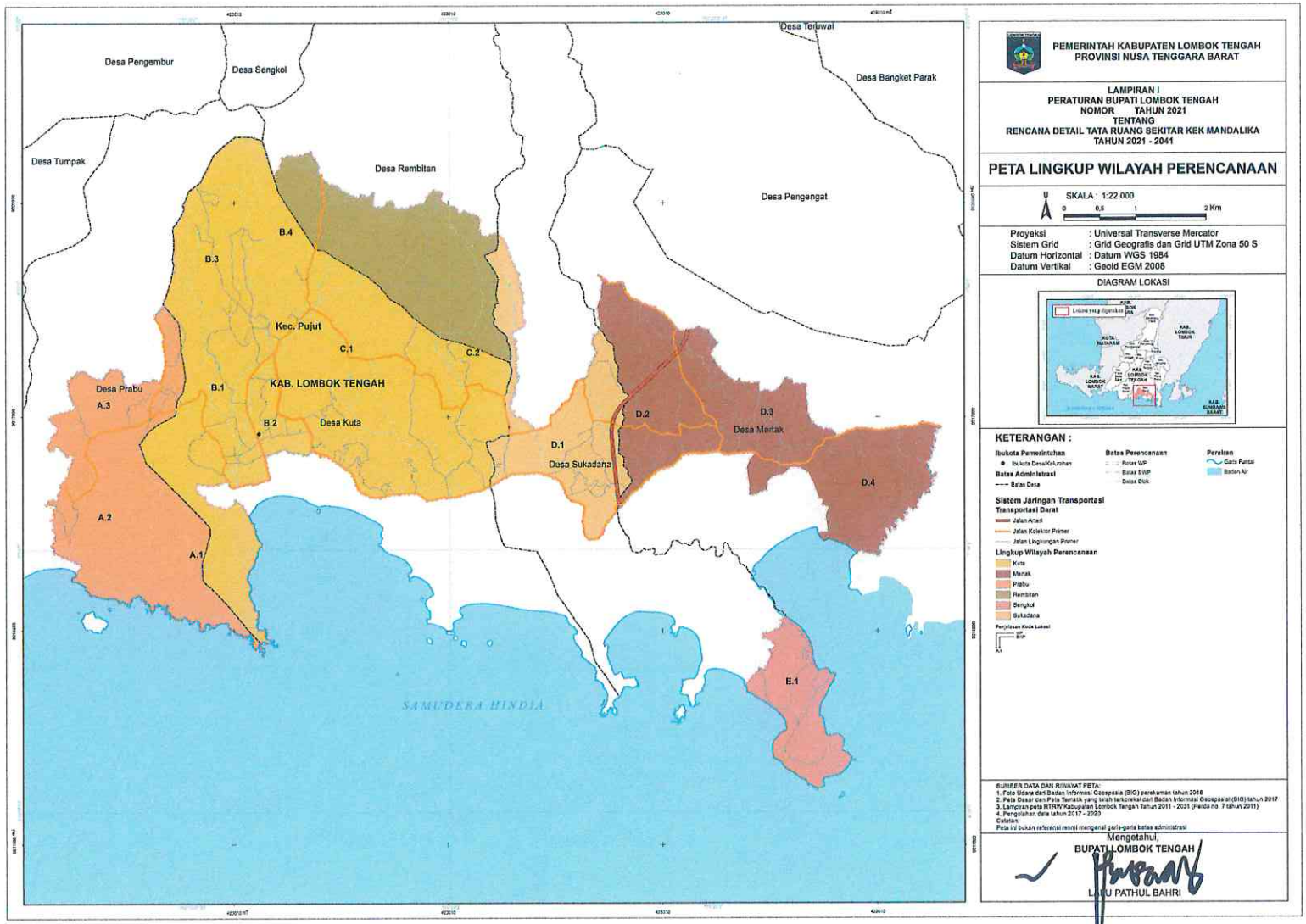
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

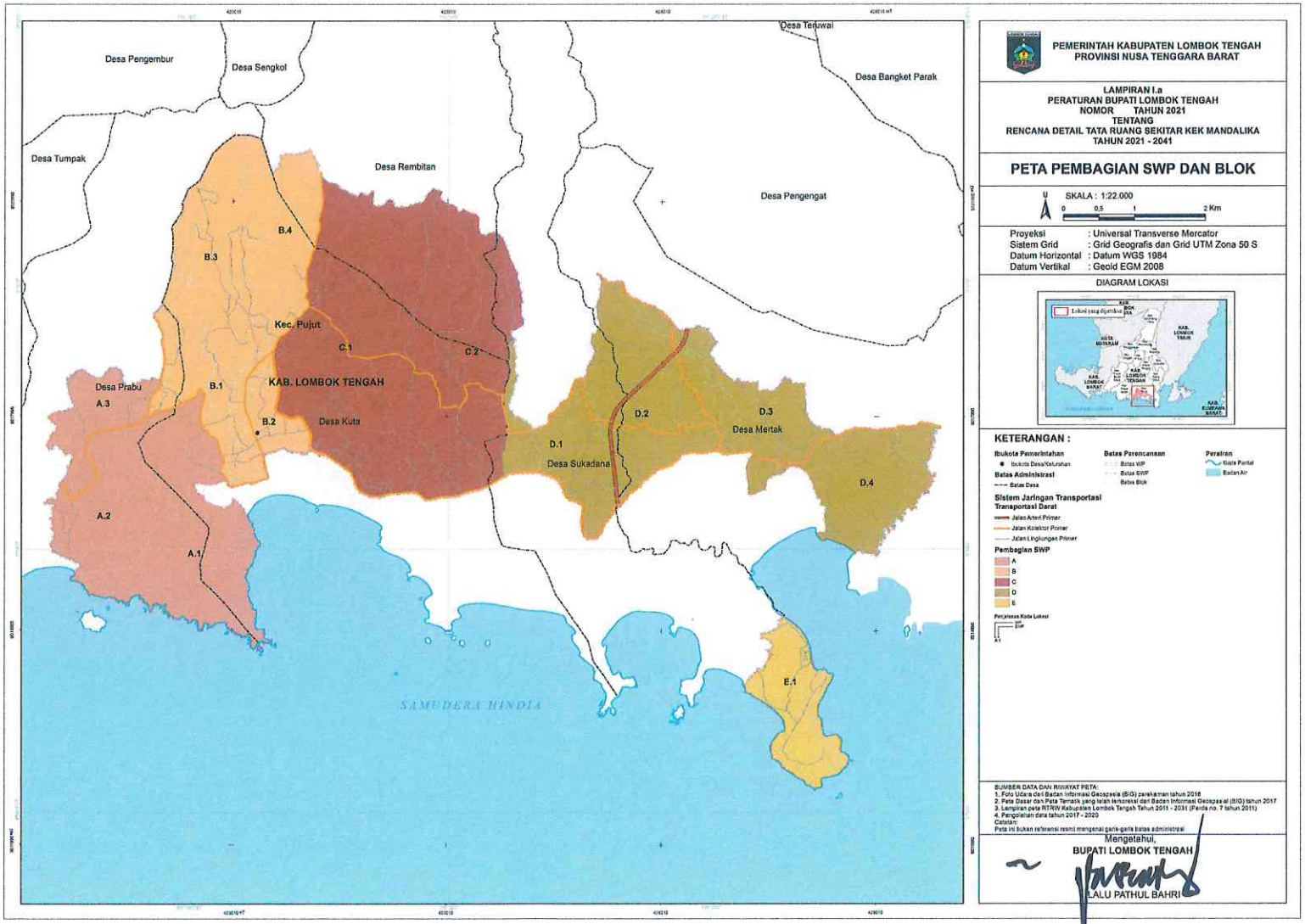
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

NOMOR

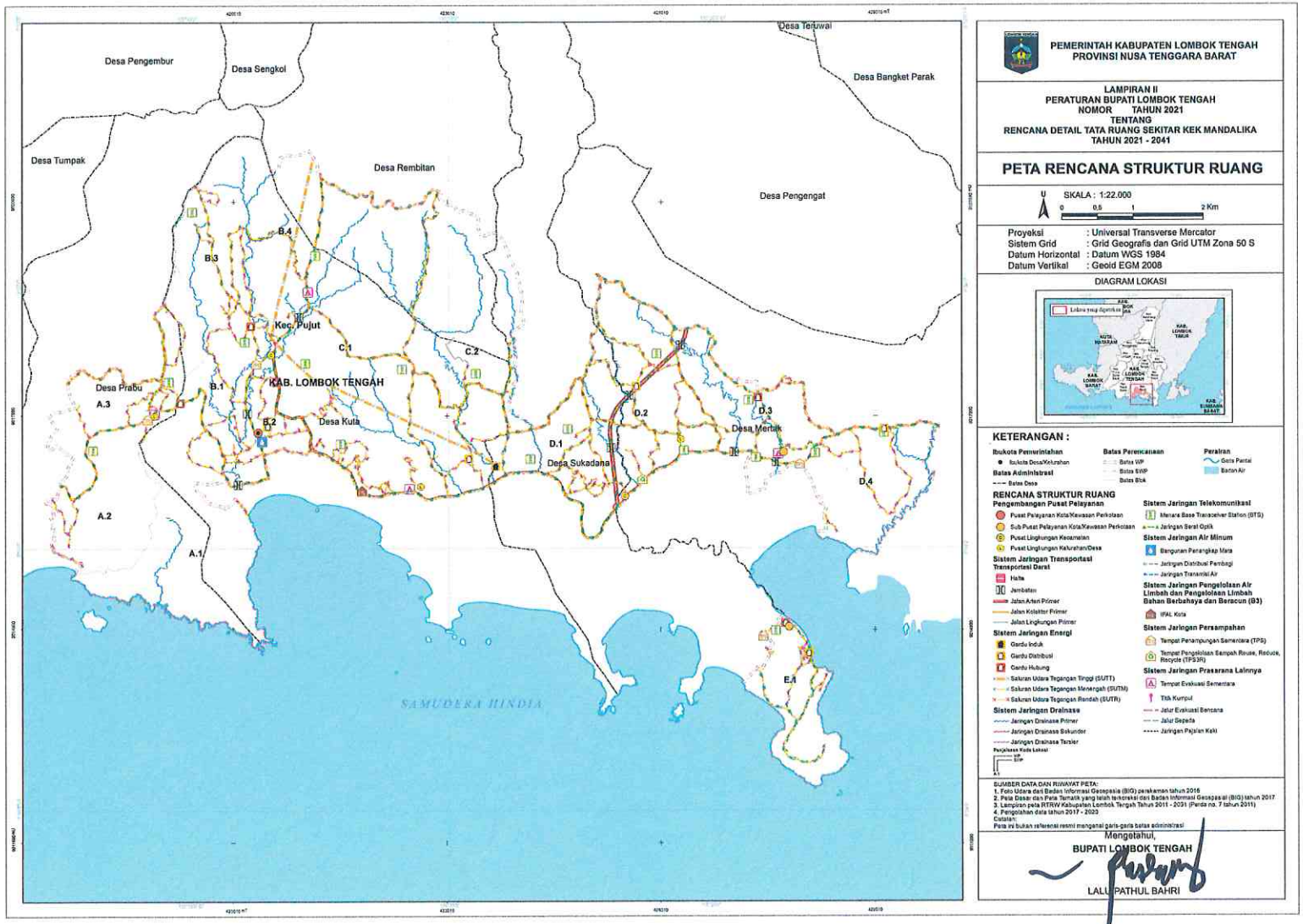
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



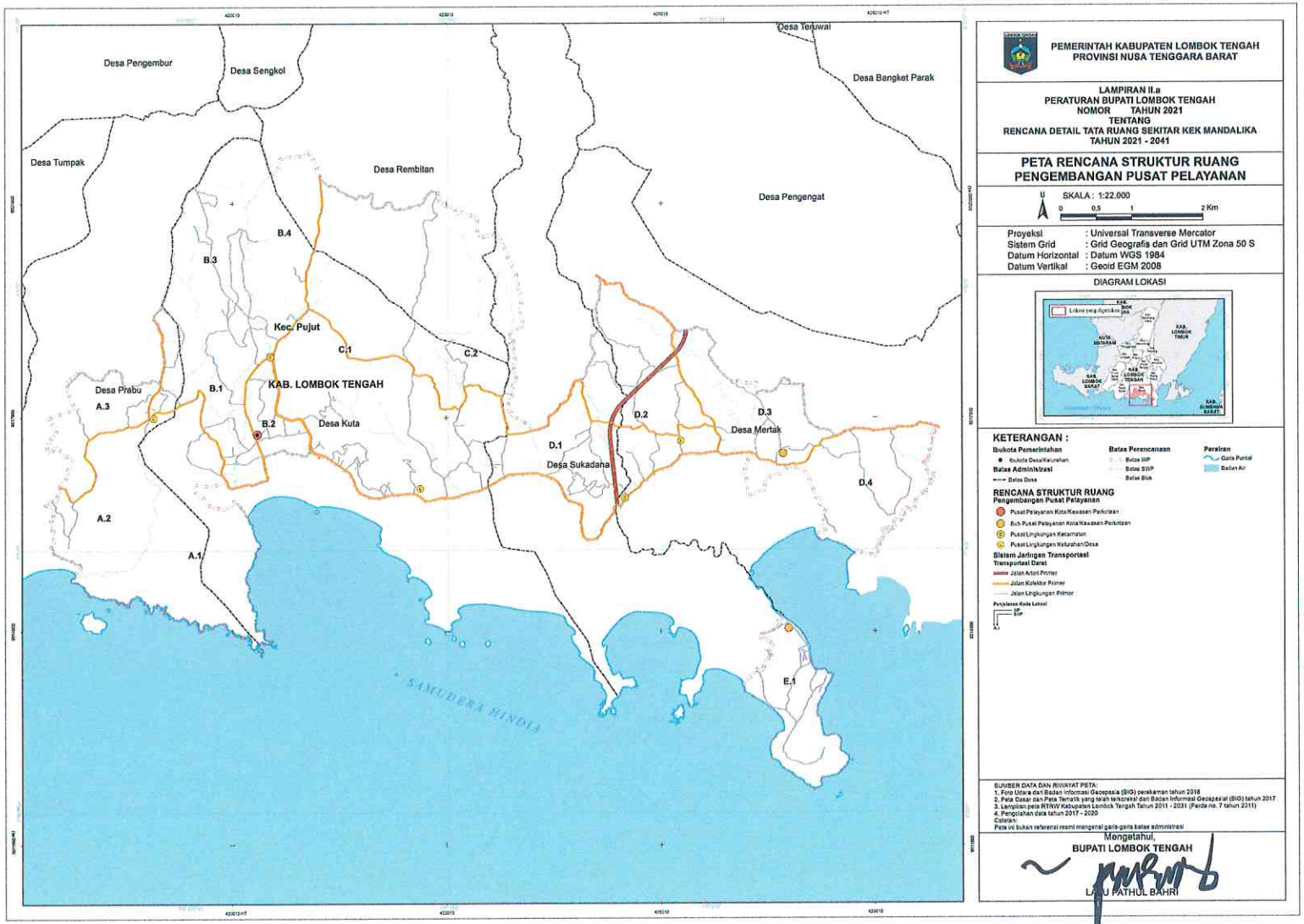
LAMPIRAN I.A
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



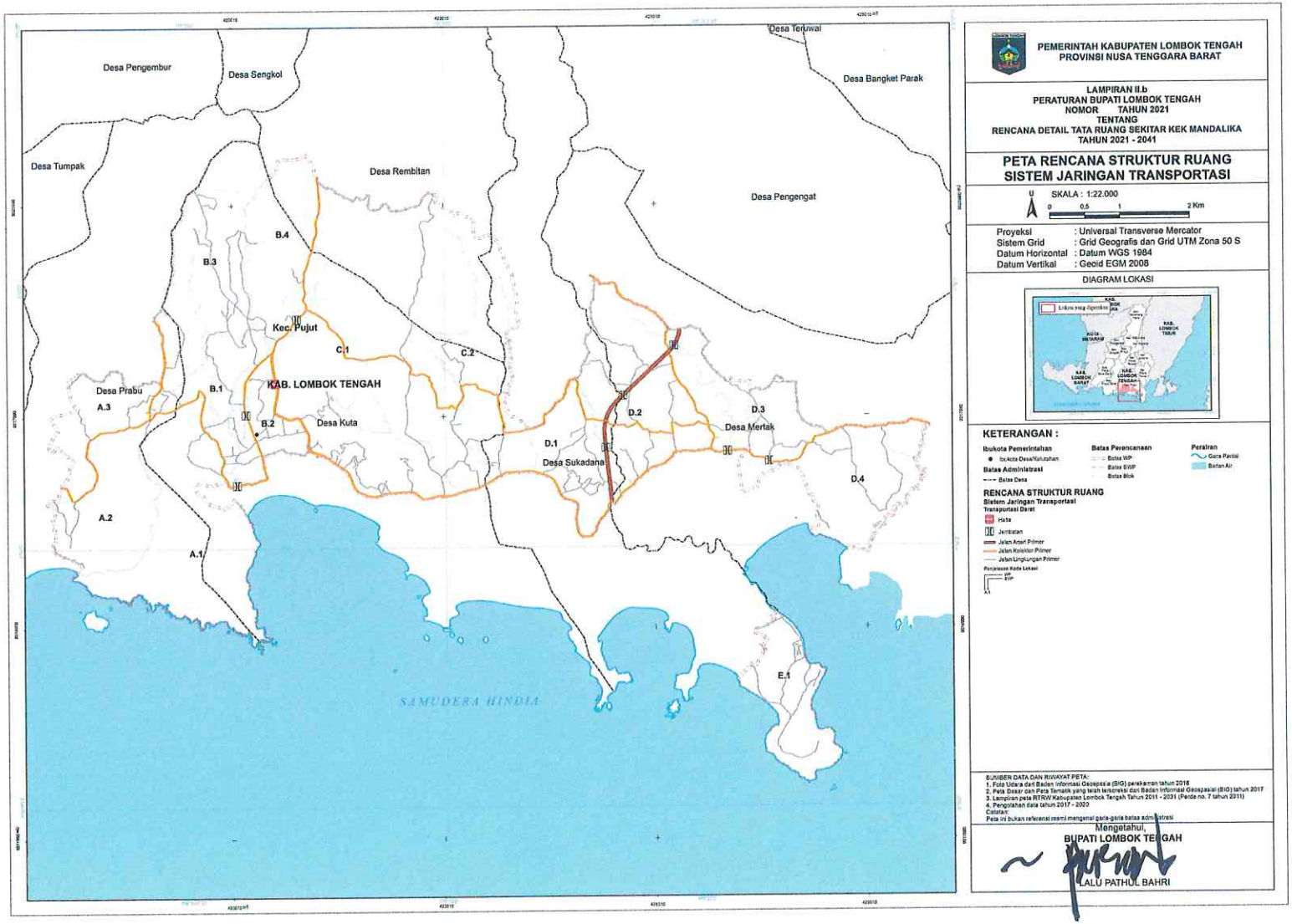
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



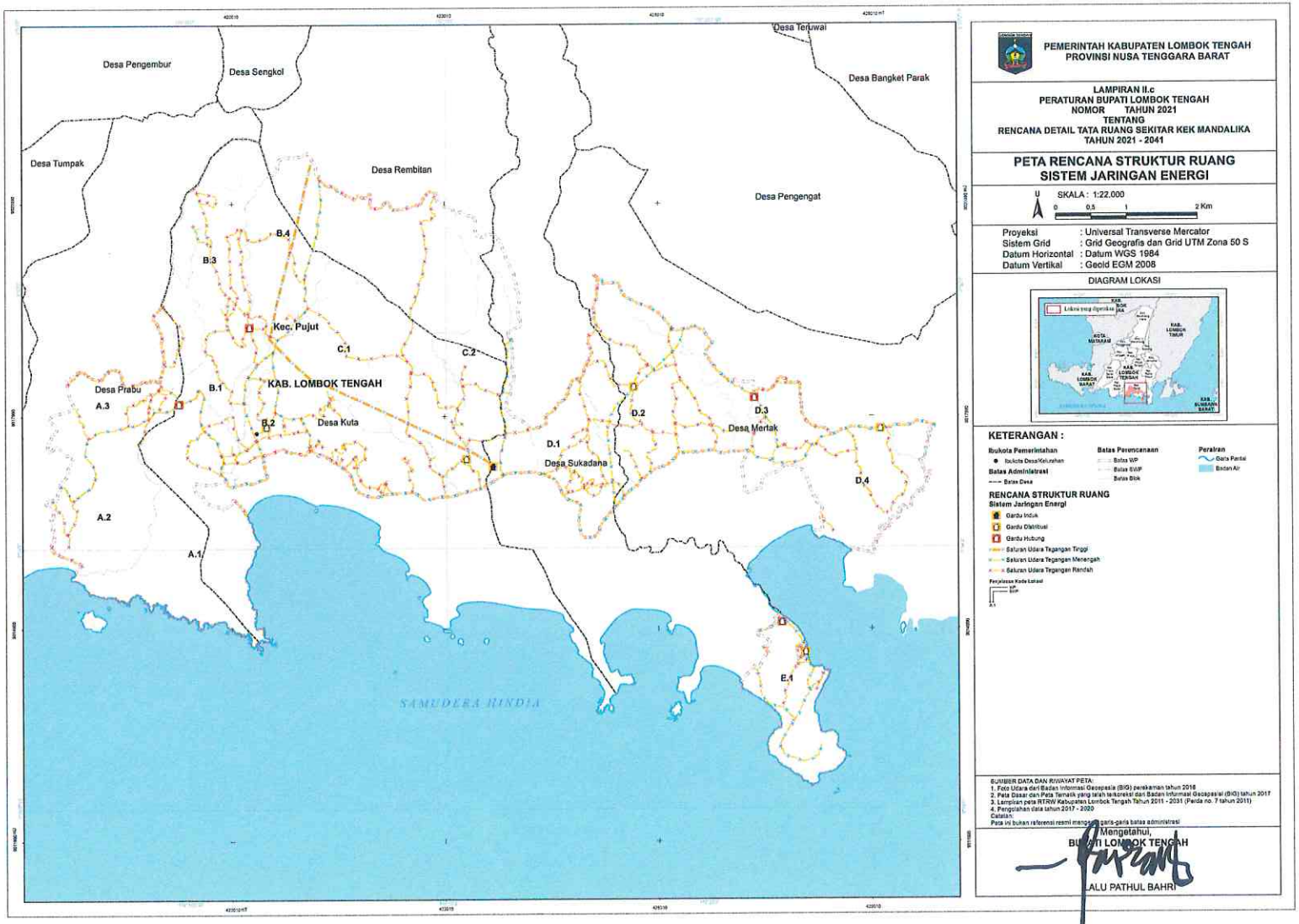
LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



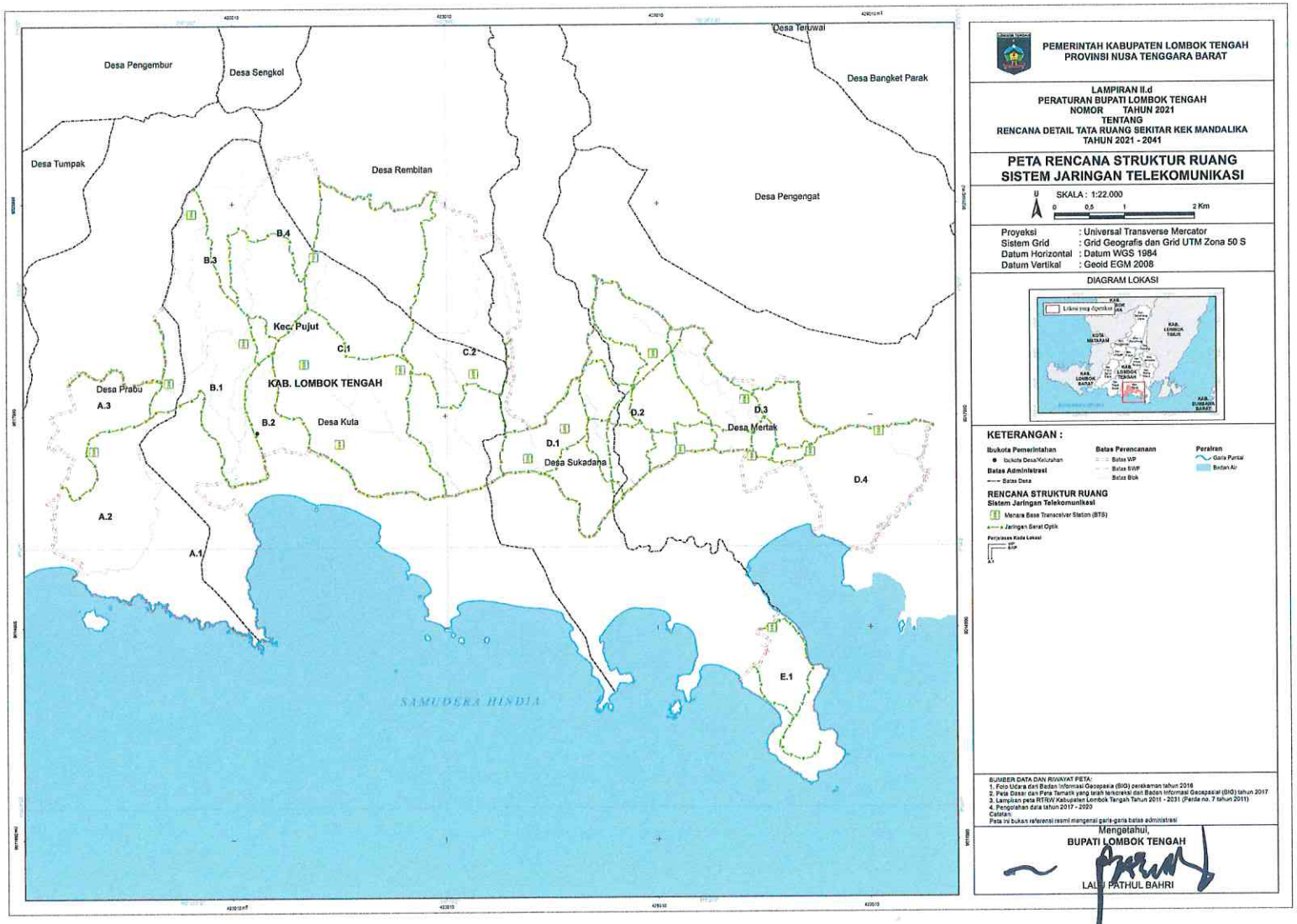
LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



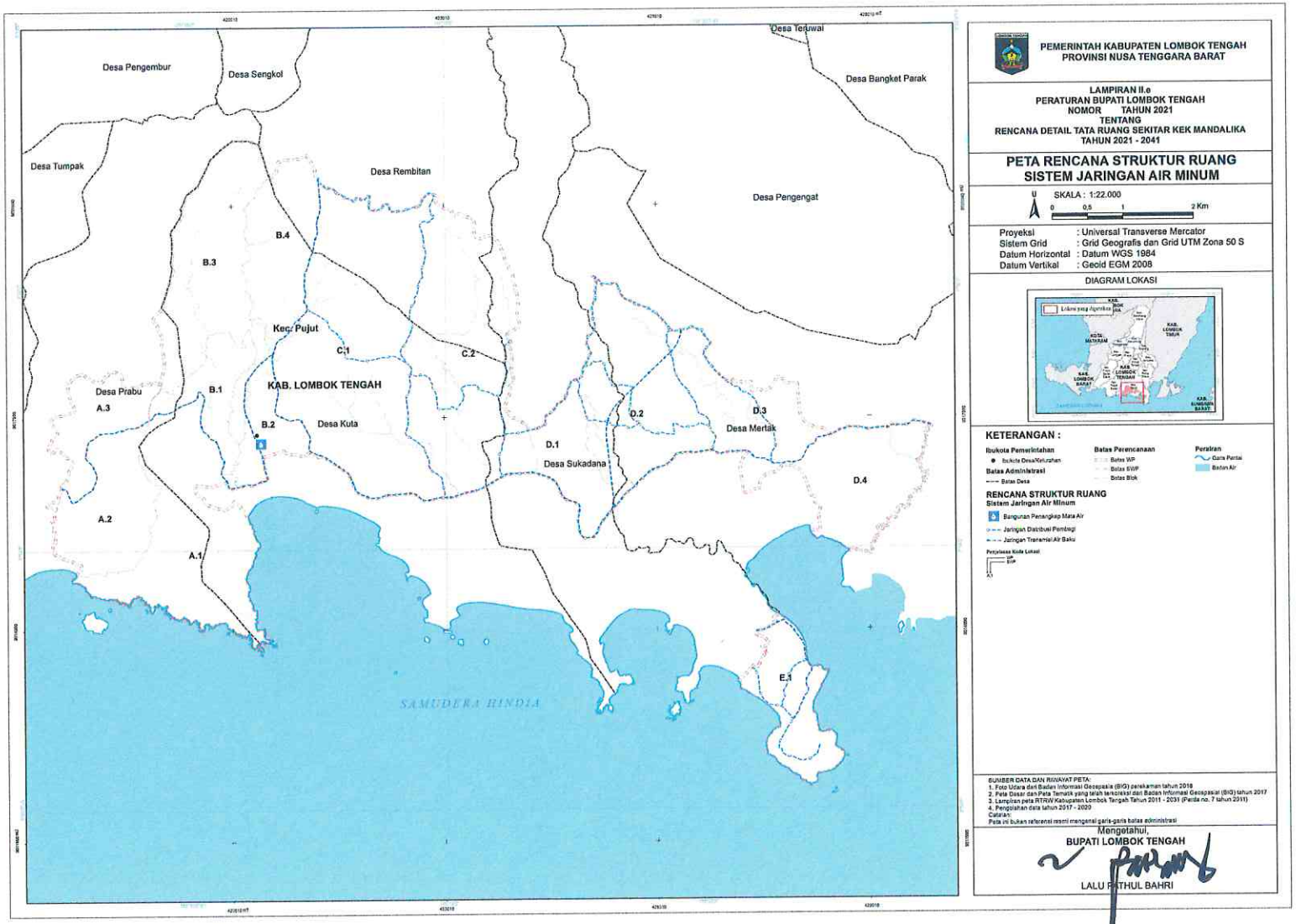
LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



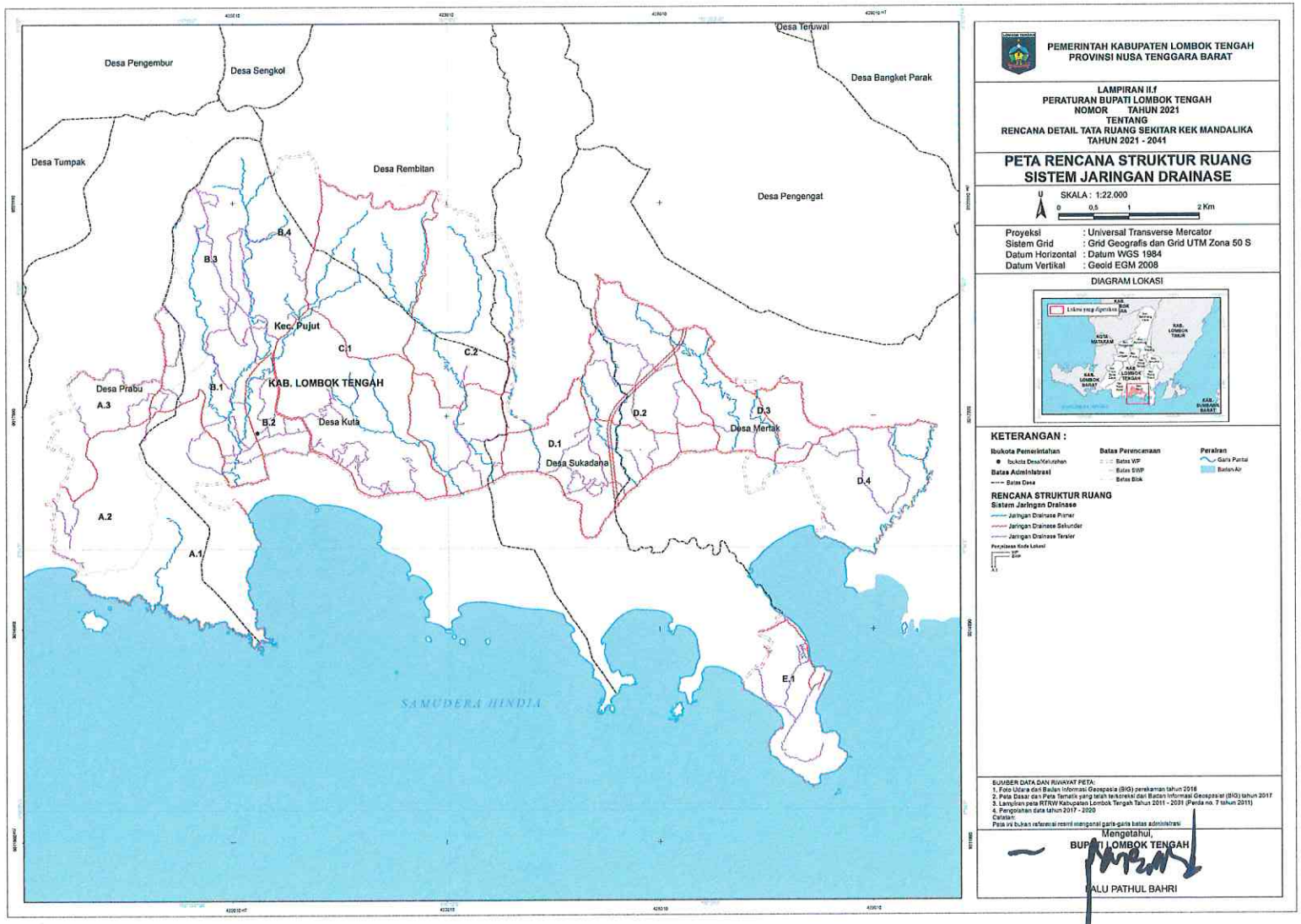
LAMPIRAN II.D
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



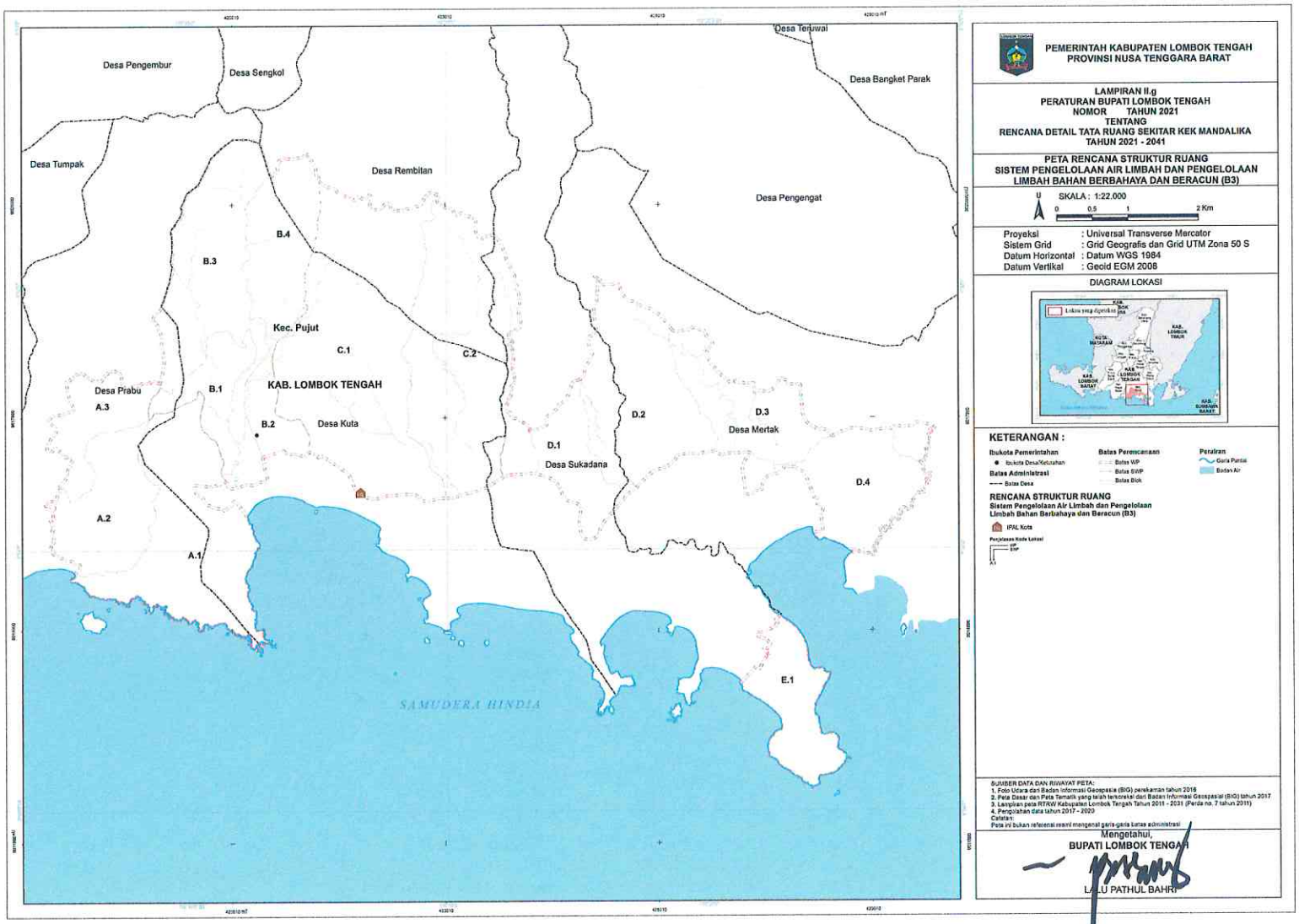
LAMPIRAN II.E
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



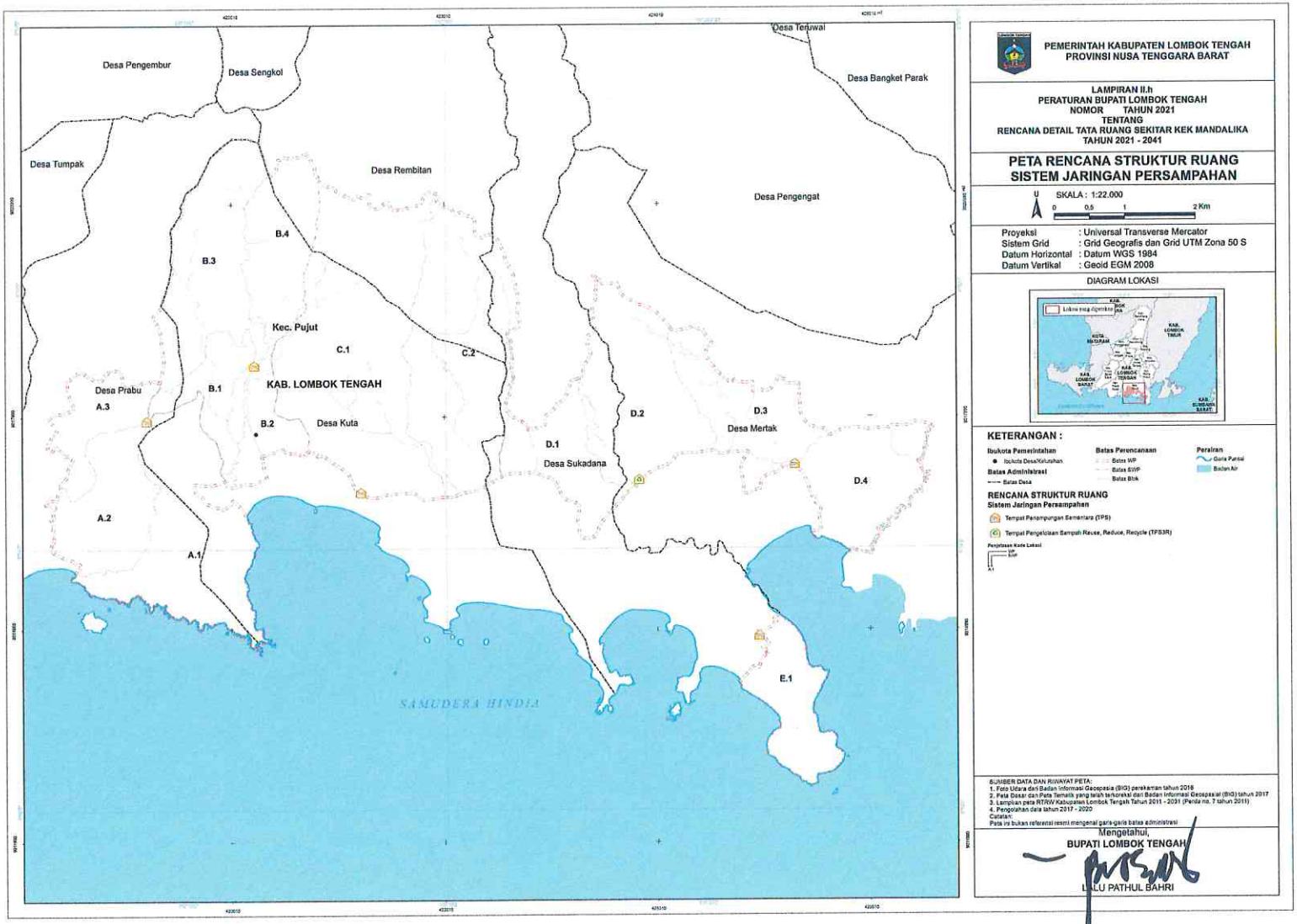
LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



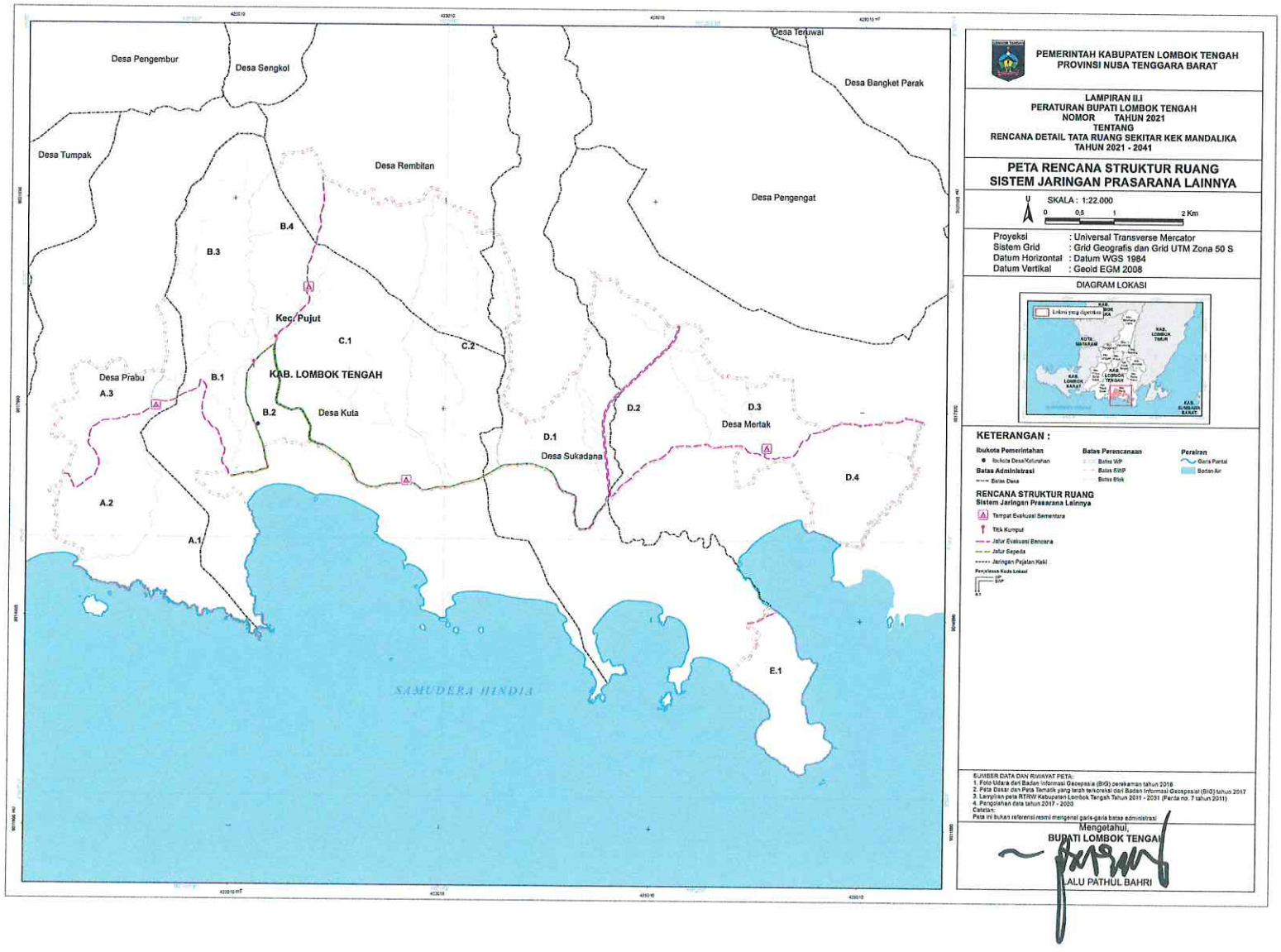
LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



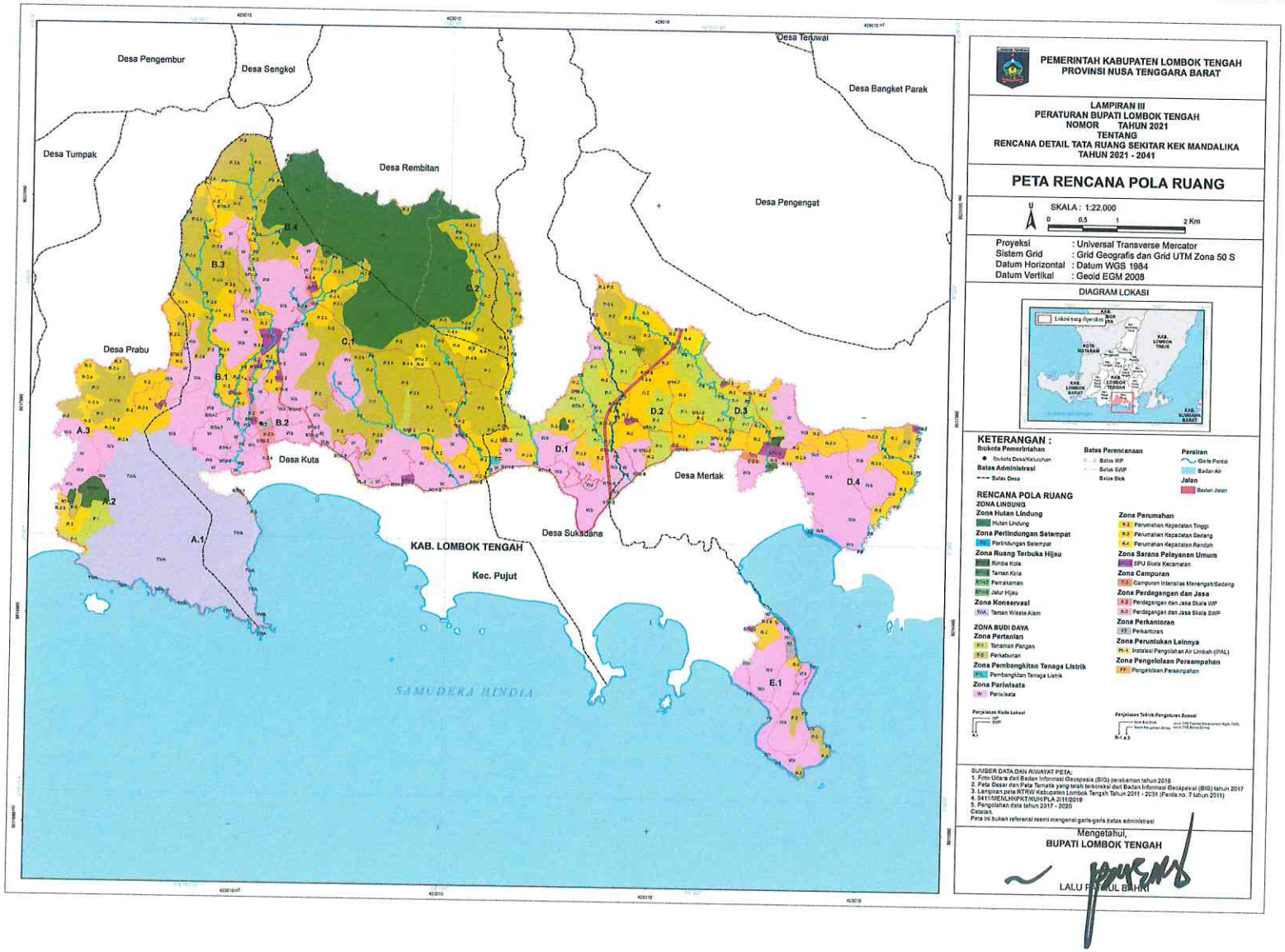
LAMPIRAN II.H
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| **I.** | **PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG** | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | **Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Pusat Pelayanana Kawasan Perkotaan** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penataan dan pemantapan kualitas lingkungan pusat pelayanan kawasan perkotaan | SWP B pada Blok B.2 | Ls | | | | | | | | | | |
| b. | Penataan dan pemantapan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa Kuta | SWP B | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah; | | | | | | | | |
| c. | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | 540,38 Ha | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan Pusat Kuliner Kuta | SWP B | 1 unit | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| **2.** | **Sub Pusat Pelayanan Kota** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penataan dan pemantapan kualitas lingkungan sub pusat pelayanan kawasan perkotaan | • SWP D pada Blok D.3<br>• SWP E pada Blok E.1 | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **3.** | **Pusat Lingkungan** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penataan dan pemantapan kualitas lingkungan pusat pelayanan lingkungan kecamatan | • SWP B pada Blok B.2<br>• SWP D pada Blok D.) | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| b. | Penataan dan pemantapan kualitas lingkungan pusat pelayanan lingkungan desa | • SWP A pada Blok A.1<br>• SWP C pada Blok C.1<br>• SWP D pada Blok D.2 | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **B.** | **Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sistem Transportasi Darat** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan jalan arteri primer ruas jalan bypass BIL - KEK Mandalika | SWP D | Ls | APBN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR | | | | | | | | |
| b. | Penanaman vegetasi pada median jalan | SWP D | Ls | APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan | Kementerian PUPR; Balai Jalan Nasional; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | |
| c. | Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan nasional:<br>• Ruas jalan Sengkol – Kuta | • SWP B<br>• SWP C | Ls | APBN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB | | | | | | | | |
| d. | Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan provinsi:<br>• Ruas jalan Sp Pengantap – Montong ajan – Kuta<br>• Ruas jalan Kuta – Keruak | • Ruas jalan Sp. pengantep – Montong ajan – Kuta terdapat di SWPA dan SWP B<br>• Ruas jalan Kuta – Keruak terdapat di SWP B, SWP C dan SWP D | Ls | APBD Provinsi dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| e. | Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan Kabupaten Lombok Tengah:<br>• Ruas jalan Rembitan – Prabu<br>• Ruas jalan Bengkang – Songgong | • Ruas jalan Rembitan – Prabu terdapat di SWP A dan SWP B<br>• Ruas jalan bengkang – Songgong terdapat di SWP D | Ls | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| f. | Pembangunan jaringan jalan Kabupaten Lombok Tengah poros tengah ruas jalan Lenser – Nandus | • SWP C<br>• SWP D | Ls | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| g. | Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan lingkungan | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C | Ls | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | • SWP D<br>• SWP E | | pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| h. | Pengembangan terminal wisata/halte/shelter | SWP B | 1 unit | APBD Provinsi NTB, APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perhubungan, Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| i. | Peningkatan dan pengembangan jembatan | • SWP B (Blok B.1) (Blok B.3)<br>• SWP C (Blok C.1)<br>• SWP D (Blok D.2) (Blok D.3) | - | APBN, APBD Provinsi NTB, APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| j. | Pengembangan ruang parkir di kawasan wisata publik | WP Sekitar KEK Mandalika | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **C.** | **Perwujudan Sistem Jaringan Energi atau Kelisrikan** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | • SWP B<br>• SWP C | - | APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan | Dinas ESDM Provinsi NTB; PLN | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | |
| b. | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | - | APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas ESDM Provinsi NTB, PLN | | | | | | | | |
| c. | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | - | APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas ESDM Provinsi NTB, PLN | | | | | | | | |
| d. | Peningkatan dan pengembangan gardu induk | SWP C (Blok C.2) | LS | APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | PLN; Swasta | | | | | | | | |
| e. | Peningkatan dan pengembangan gardu hubung | • SWP A (Blok A.1)<br>• SWP B (Blok B.1)<br>• SWP D (Blok D.3)<br>• SWP E (Blok E-1) | LS | APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | PLN, swasta | | | | | | | | |
| d. | Peningkatan dan pengembangan gardu distribusi | • SWP B (Blok B.2)<br>• SWP C (Blok C.2) | LS | APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai | PLN, swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | • SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.4<br>• SWP E (Blok E1) | | dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | |
| **D.** | **Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Peningkatan dan pengembangan pelayanan tower BTS | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D (<br>• SWP E | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, swasta | | | | | | | | |
| b. | Pembangunan jaringan tetap berupa jaringan serat optik | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP E | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, swasta | | | | | | | | |
| **E.** | **Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Peningkatan jaringan pipa transmisi air baku | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, PDAM Kabupaten Lombok Tengah, Swasta | | | | | | | | |
| b. | Peningkatan jaringan pipa distribusi | • SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, PDAM Kabupaten Lombok Tengah, Swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | perundang-undangan | | | | | | | | | |
| c. | Peningkatan bangunan penangkap mata air | SWP B (Blok B.1) | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, PDAM Kabupaten Lombok Tengah, Swasta | | | | | | | | |
| **F.** | **Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang melayani Kawasan Sekitar KEK Mandalika | SWP C Blok C.1 | LS | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **G.** | **Perwujudan Sistem Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan Tempat Penampungan Sampah *Re-Use, Recycle, Reduce* (TPS3R) | • SWP D (Blok D.2) | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) | • SWP A (Blok A.2)<br>• SWP B (Blok B.1)<br>• SWP C (Blok C.1)<br>• SWP D (Blok D.4)<br>• SWP E (Blok E-1) | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **H.** | **Perwujudan Sistem Jaringan Drainase** | | | | | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| a. | Peningkatan sistem jaringan dan kapasitas drainase primer, sekunder, dan tersier. | • SWP A (Blok A.1) (Blok A.2) (Blok A.3)<br>• SWP B (Blok B.1) (Blok B.2) (Blok B.3) (Blok B.4)<br>• SWP C (Blok C.1) (Blok C.2)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.2) (Blok D.3) (Blok D.4)<br>• SWP E (Blok E-1) | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; | | | | | | | | |
| b. | Rencana penyediaan jaringan pengendalian banjir | WP Sekitar KEK Mandalika | - | APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **I.** | **Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penyediaan titik kumpul sebagai ruang evakuasi bencana | • SWP B (Blok B.2) (dua titik kumpul)<br>• SWP B (Blok B.3) (satu titik kumpul) | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| b. | Penyediaan jalur evakuasi bencana | • Ruas By pass BIL-Mandalika SWP D | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain | Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | (Blok D.1) (Blok D.2) (Blok D.1)<br>• Ruas Sengkol – Kuta SWP B (Blok B.4) (Blok B.3) (Blok B.2), SWP C (Blok C.1)<br>• Ruas SP Pengantep Montong Ajan – Kuta SWP A (Blok A.1) (Blok A.2) (Blok A.3), SWP B (Blok B.1) Blok B.2) | | yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| c. | Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES) | • SWP A (Blok A.1)<br>• SWP C (Blok C.1) (dua TES)<br>• SWP D (Blok D.3) | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| d. | Pengembangan sistem peringatan dini terhadap bencana | • SWP A (Blok A.1) (Blok A.2) (Blok A.3)<br>• SWP B (Blok B.1) (Blok B.2) (Blok B.3) (Blok B.4) | LS | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | • SWP C (Blok C.1) (Blok C.2)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.2) (Blok D.3) (Blok D.4)<br>• SWP E (Blok E-1) | | | | | | | | | | | |
| e. | Pengembangan jalur pedestrian untuk pejalan kaki yang melewati ruas jalan SP Pengantap – Montong ajan – Kuta, ruas jalan Sengkol – Kuta dan ruas jalan Kuta – Kruak | • SWP B<br>• SWP C | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| f. | Pengembangan jalur sepeda yang melewati ruas jalan SP Pengantap – Montong ajan – Kuta, ruas jalan Sengkol – Kuta dan ruas jalan Kuta – Kruak | • SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D | - | APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **II.** | **PERWUJUDAN POLA RUANG** | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | **Perwujudan Zona Lindung** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Perwujudan Zona Hutan Lindung** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Rehabilitasi dan reforestrasi kawasan hutan lindung | • SWP B (Blok B.4)<br>• SWP C (Blok C.1, C-2) | 438,53 Ha | APBN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, swasta | | | | | | | | |
| b. | Pengendalian terhadap alih fungsi lahan hutan lindung | • SWP B (Blok B.4)<br>• SWP C (Blok C.1, C-2) | 438,53 Ha | APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | |
| **2.** | **Perwujudan Zona Perlindungan Setempat** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | 80,61 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| b. | Penataan kawasan sekitar sempadan pantai dan sempadan sungai | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | 80,61 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| c. | Pembebasan dan penertiban pemanfaatan sempadan pantai dan sempadan sungai | • SWP A<br>• SWP B<br>• SWP C<br>• SWP D<br>• SWP E | 80,61 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **4.** | **Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan RTH Rimba Kota | • SWP A (Blok A.1 dan Blok A.2)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.3) | 19,17 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB; Swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | perundang-undangan | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan RTH Taman Kota (DED dan Pembangunan) | • SWP B (Blok B.2)<br>• SWP D (Blok D.2) (Blok D.3) (Blok D.4) | 2,67 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| c. | Penataan Tempat Pemakaman Umum | • SWP A (Blok A.1) (Blok A.2)<br>• SWP B (Blok B.3)<br>• SWP C (Blok C.1) (Blok C.2)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.2) (Blok D.3)<br>• SWP E (Blok E-1) | 1,42 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| d. | Penataan Jalur Hijau | • SWP B (Blok B.2) (Blok B.3)<br>• SWP C (Blok C.1) (Blok C.2)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.2) (Blok D.3) | 4,86 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| d. | Penyediaan pemenuhan pengembangan RTH Publik pada zona budidaya | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyediaan RTH Publik pada zona pariwisata sebesar 15% | WP Sekitar KEK Mandalika | 149,09 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah; Swasta | | | | | | | | |
| | b. Penyediaan RTH Publik pada zona perkebunan sebesar 24% | WP Sekitar KEK Mandalika | 186,79 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah; Swasta | | | | | | | | |
| | c. Penyediaan RTH Publik pada zona perumahan sebesar 15% | WP Sekitar KEK Mandalika | 95,79 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB/Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah; Swasta | | | | | | | | |
| **5.** | **Perwujudan Zona Konservasi** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Reforestrasi Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu | SWP A (Blok A.1) (Blok A.2) | 445,98 Ha | APBN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA SKW I Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB; Swasta | | | | | | | | |
| b. | Pengendalian terhadap alih fungsi lahan TWA Gunung Prabu menjadi kawasan budidaya | SWP A (Blok A.1) (Blok A.2) | 445,98 Ha | APBN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA SKW I Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB; Swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| c. | Kerjasama Pemanfaatan dan Pengelolaan TWA Prabu untuk Kegiatan Wisata Alam/Wisata Tracking tanpa mengubah bentang alam | SWP A (Blok A.1) (Blok A.2) | 445,98 Ha | APBN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA SKW I Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah; ITDC; swasta | | | | | | | | |
| **B.** | **Perwujudan Zona Budidaya** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Perwujudan Zona Perumahan** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan | WP Sekitar KEK Mandalika | 636,84 Ha | APBN, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/ Kabupaten Lombok Tengah, swasta | | | | | | | | |
| b. | Penyediaan sarana dan prasarana umum penunjang perumahan | WP Sekitar KEK Mandalika | Ls | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| c. | Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman | WP Sekitar KEK Mandalika | 636,84 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| d. | Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang | WP Sekitar KEK Mandalika | 636,84 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| **2.** | **Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya | • SWP B (Blok B.1) (Blok B.2) (Blok B.4)<br>• SWP D (Blok D.3) (Blok D.4) | 20,04 Ha | APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| b. | Revitalisasi Pasar Tradisional | SWP B | 1 unit | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| d. | Peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan dan jasa | • SWP B (Blok B.1) (Blok B.2) (Blok B.4)<br>• SWP D (Blok D.3) (Blok D.4) | 20,04 Ha | APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| **3.** | **Perwujudan Zona Perkantoran** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Perbaikan kantor dan penambahan sarana pelayanan di kantor pemerintah | • SWP B (Blok B.2)<br>• SWP E (Blok E-1) | 4,85 Ha | APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | |
| b. | Penataan zona perkantoran | • SWP B (Blok B.2)<br>• SWP E (Blok E.1) | 4,85 Ha | APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, swasta | | | | | | | | |
| **4.** | **Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Peningkatan dan pengembangan sarana pelayanan umum skala kecamatan | • SWP A (Blok A.1) (Blok A.3)<br>• SWP B (Blok B.1) (Blok B.2) (Blok B.3) (Blok B.4)<br>• SWP C (Blok C.1) (Blok C.2)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.2) (Blok D.3) (Blok D.4)<br>• SWP E (Blok E-1) | 28,71 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas PUPR Provinsi NTB; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; ITDC; Swasta | | | | | | | | |
| **5.** | **Perwujudan Zona Pertanian** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan | • SWP A (Blok A.2)<br>• SWP C (Blok C.1)<br>• SWP D (Blok D.1) (Blok D.2)(Blok D.3) | 245,52 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| b. | Pengendalian pengembangan kawasan perkebunan | • SWP A (Blok A.1) (Blok, A-2) (Blok A.3<br>• SWP B (Blok B.1)(Blok B.3)(Blok B.4)<br>• SWP C (Blok C.1) (Blok, C-2)<br>• SWP D (Blok D.2) (Blok D.4)<br>• SWP E (Blok E-1) | 774,95 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah | | | | | | | | |
| **6.** | **Perwujudan Zona Pariwisata** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan dan pengembangan Menara Mertak sebagai landmark kawasan | SWP D | 1 unit (ketinggian 99 m, RTH 5 ha) | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; swasta | | | | | | | | |
| b. | Pembangunan dan pengembangan Plaza Mertak sebagai landmark kawasan | SWP D | 1 unit, luas 15.000 m2 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; Swasta | | | | | | | | |
| c. | Pengembangan daya tarik wisata: wisata bahari, agrowisata perkebunan, ekowisata, desa wisata, dll | WP Sekitar KEK Mandalika | LS | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan | Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; ITDC; swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| | | | | perundang-undangan | | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan sarana pendidikan keahlian dan ruang kreatif | WP Sekitar KEK Mandalika | - | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; ITDC; swasta | | | | | | | | |
| e. | Pengembangan amenitas: tempat penginapan/ homestay, restoran/tempat makan, *tourist information centre*, lahan parkir, dll. | WP Sekitar KEK Mandalika | 992,62 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; ITDC; swasta | | | | | | | | |
| f | Pengembangan event wisata | WP Sekitar KEK Mandalika | LS | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah; ITDC; swasta | | | | | | | | |
| **8.** | **Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik | SWP C (Blok C.2) | 1,44 Ha | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | PLN; swasta | | | | | | | | |

| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | VOLUME | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | | | | II | III | IV | V |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2041 |
| **9.** | **Perwujudan Zona Campuran** | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penataan dan Pengembangan zona campuran sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya | • SWP D (Blok D.2) (Blok D.4) | 3,71 Ha | APBN, APBD Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, swasta | | | | | | | | |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.A
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

# TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN RDTR SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

| id_kegiatan | kegiatan | id_KBLI_3digit | id_KBLI_4digit | id_KBLI_5digit | Zona Hutan Lindung | Zona Perlindungan Setempat | Zona RTH | | | | Zona Konservasi | Zona Pertanian | | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Peruntukan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hutan Lindung | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Pemakaman | Jalur Hijau | Taman Wisata Alam | Tanaman Pangan | Perkebunana | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pariwisata | Rumah Kepadatan Tinggi | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kecamatan | Campuran Intensitas Menengah | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | IPAL |
| | | | | | HL | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-7 | RTH-8 | TWA | P-1 | P-3 | PTL | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-2 | C-2 | K2 | K3 | KT | PP | PL-4 |
| I | **KEGIATAN PERUMAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | Rumah Tunggal | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 002 | Rumah Kopel | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 003 | Rumah Deret | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 004 | Rumah Susun rendah | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 005 | Rumah Susun Sedang | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 006 | Rumah sewa/kost | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 007 | Panti | 871 | 8710 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | T3 | T3 | T3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 008 | Rumah Adat | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | B2,B3 | I | I | I | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| II | **KEGIATAN PERDAGANGAN DAN JASA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | Mall / Plaza | 410 | 4101 | 41014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B3 | B1,B2, B3 | I | I | B1, B3 | x | x |
| 010 | Supermarket | 471 | 4711 | 47111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | x | x | x | x | B1,B2, B3 | I | I | x | x | x |
| 011 | Mini Market | 471 | 4711 | 47111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | x | x | I | I | x | x | x |
| 012 | *Showroom* | 451 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | I | I | x | x | x |
| 013 | Grosir | 471 | 4719 | 47192 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | x | x | x | x | T3 | I | I | x | x | x |
| 014 | Pertokoan | 471 | 4719 | 47192 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | I | I | I | x | x | x |
| 015 | Toko | 471 | 4719 | 47192 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | I | I | I | x | x | x |

| id_kegiatan | kegiatan | id_KBLI_3digit | id_KBLI_4digit | id_KBLI_5digit | Zona Hutan Lindung | Zona Perlindungan Setempat | Zona RTH | | | | Zona Konservasi | Zona Pertanian | | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Peruntukan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hutan Lindung | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Pemakaman | Jalur Hijau | Taman Wisata Alam | Tanaman Pangan | Perkebunana | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pariwisata | Rumah Kepadatan Tinggi | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kecamatan | Campuran Intensitas Menengah | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | IPAL |
| | | | | | HL | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-7 | RTH-8 | TWA | P-1 | P-3 | PTL | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-2 | C-2 | K2 | K3 | KT | PP | PL-4 |
| 016 | Warung/Kios | 471 | 4719 | 47192 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | x | I | I | I | x | x | x |
| 017 | Pasar Tradisional | 478 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1,T3 | T1,T3 | x | x | x |
| 018 | SPBU | 473 | 4730 | 47301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | x | x |
| | **Jasa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Jasa Penyedia Makanan dan Minuman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | Pusat Jajan | 561 | 5610 | 56109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | x | I | I | I | x | x | x |
| 020 | Rumah Makan | 561 | 5610 | 56109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | x | I | I | I | T3 | x | x |
| 021 | Bakery | 478 | 4782 | 47822 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | x | I | I | I | x | x | x |
| 022 | Catering/Jasa Boga | 562 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | T1,T2 | T1, T2 | T1,T2 | x | I | I | I | x | x | x |
| 023 | Cafe | 563 | 5630 | 56303 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | B1, B2 | B1, B2 | B1,B2 | x | I | I | I | x | x | x |
| | **Jasa Lembaga Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | Bank | 641 | 6412 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T2,T3 | x | x | x | x | T2,T3 | I | I | T3 | x | x |
| 025 | Koperasi | 641 | 6414 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T3 | T1, T3 | T1, T3 | T1, T3 | x | T1, T3 | I | I | T3 | x | x |
| 026 | ATM | 664 | 6642 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | I | T3 | T3 | I | T3 | I | I | I | x | x |
| 027 | Pegadaian | 649 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | T1,T2 | T1,T2 | T1,T2 | T1,T2 | T3 | I | I | I | x | x |
| 028 | Asuransi | 651 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | x | x | x | x | T3 | I | I | T3 | x | x |
| | **Jasa Lainnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | Salon | 961 | 9611 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | T1,T3 | T1,T3 | T1,T3 | x | T3 | I | I | x | x | x |
| 030 | Travel dan pengiriman barang | 532 | 5320 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1,T3 | T1,T3 | T1,T3 | T1,T3 | x | T1,T3 | I | I | x | x | x |
| 031 | Bengkel | 452 | 4520 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1,T3 | T1,T3 | T1,T3 | T1,T3 | x | T1,T3 | I | I | x | x | x |
| 032 | Kantor Bisnis dan Pemasaran Properti | 461 | 4610 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1,T3 | T1,T3 | x | T3 | I | I | T2, T3 | x | x |
| 033 | Jasa Jahit Pakaian | 141 | 1412 | 14120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | T1,T2 | T1,T2 | x | x | I | I | I | x | x | x |
| 034 | Lembaga Bimbingan Belajar | 854 | 8549 | 85495 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1,T3 | T3 | T3 | T3 | x | T1,T3 | I | I | T3 | x | x |
| 035 | Rental Kendaraan | 771 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | T1,T2 | T1,T2 | x | x | I | I | I | x | x | x |

| id_kegiatan | kegiatan | id_KBLI_3digit | id_KBLI_4digit | id_KBLI_5digit | Zona Hutan Lindung | Zona Perlindungan Setempat | Zona RTH | | | | Zona Konservasi | Zona Pertanian | | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Peruntukan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hutan Lindung | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Pemakaman | Jalur Hijau | Taman Wisata Alam | Tanaman Pangan | Perkebunana | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pariwisata | Rumah Kepadatan Tinggi | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kecamatan | Campuran Intensitas Menengah | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | IPAL |
| | | | | | HL | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-7 | RTH-8 | TWA | P-1 | P-3 | PTL | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-2 | C-2 | K2 | K3 | KT | PP | PL-4 |
| 036 | Jasa Printing, Sablon, Periklanan, Cetak Foto, dll | 821 | 8219 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | T1,T2 | T1,T2 | x | x | I | I | I | x | x | x |
| 037 | Pergudangan | 521 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | x | x | x | x | T3 | I | I | x | x | x |
| | **Kegiatan Perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 038 | Kantor Instansi Kabupaten | 410 | 8411 | 41012 | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | I | x | x |
| 039 | Kantor kecamatan | 841 | 8411 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | I | x | x |
| 040 | Kantor Kelurahan | 841 | 8411 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | I | x | x |
| 041 | Kantor Polisi | 842 | 8423 | 84231 | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | x | B2 | B2 | B2 | B2 | x | B2 | B2 | B2 | I | x | x |
| | **Kegiatan Wisata dan Hiburan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Jasa Penginapan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | Hotel Bintang | 551 | 5511 | 55110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | x | x | x | x |
| 043 | Hotel Melati/Losmen/Wisma | 551 | 5511 | 55120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1, B2, B3 | x | x |
| 044 | Home stay/guest house | 551 | 5511 | 55130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1, B2, B3 | x | x |
| 045 | Villa/bungalow | 551 | 5511 | 55193 | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | x | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | **Jasa Hiburan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 046 | Taman hiburan | 932 | 9321 | | x | x | x | I | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | x | Bl,B2, B3 | Bl,B2, B3 | x | x | x |
| 047 | Bisnis lapangan olahraga | 931 | 9311 | 93111 | x | x | x | B1,B 2,B3 | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | x | x | x | I | x | I | I | x | x | x |
| 048 | Teater | 900 | 9001 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | x | I | I | x | x | x |
| 049 | Bioskop | 591 | 5914 | 59140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1 | x | x | x | x | B1 | I | I | x | x | x |
| | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 | Wisata Alam | 932 | 9322 | | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B 2,B3 | B1,B 2,B3 | x | x | B1,B 2,B3 | B1,B2 ,B3 | B1,B2, B3 | x | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 051 | Wisata Buatan | 933 | 9323 | | x | x | x | B1,B 2,B3 | x | x | x | x | x | x | I | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 052 | Wisata Budaya | 910 | 9102 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | B2 | x | x | x | x | I | I | I | x | x |
| 053 | Kebun Raya | 910 | | | x | x | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| id_kegiatan | kegiatan | id_KBLI_3digit | id_KBLI_4digit | id_KBLI_5digit | Zona Hutan Lindung | Zona Perlindungan Setempat | Zona RTH | | | | Zona Konservasi | Zona Pertanian | | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Peruntukan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hutan Lindung | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Pemakaman | Jalur Hijau | Taman Wisata Alam | Tanaman Pangan | Perkebunana | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pariwisata | Rumah Kepadatan Tinggi | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kecamatan | Campuran Intensitas Menengah | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | IPAL |
| | | | | | HL | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-7 | RTH-8 | TWA | P-1 | P-3 | PTL | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-2 | C-2 | K2 | K3 | KT | PP | PL-4 |
| | **Kegiatan Industri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 054 | Industri Menengah | 102 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | x | x |
| 055 | Industri Kecil | 102 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | B1,B2, B3 | x | x | x |
| | **Sarana Pelayanan Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 056 | Playgroup/Pendidikan Anak Usia Dini | 851 | 8513 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | T2, T3 | T2, T3 | B2,B3 | I | x | x | x | x | x | x |
| 057 | TK | 851 | 8513 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | T2, T3 | T2, T3 | B2,B3 | I | x | x | x | x | x | x |
| 058 | SD/MI | 851 | 8511 | 85111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | B2,B3 | T2, T3 | B2,B3 | I | x | x | x | x | x | x |
| 059 | SLTP/MTS | 851 | 8511 | 85112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | B2,B3 | T2, T3 | B2,B3 | I | x | x | x | x | x | x |
| 060 | SMU/MA/SMK | 852 | 8522 | 85220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | x | x | x | I | x | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 061 | Akademi/ Perguruan Tinggi | 853 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 062 | Pondok Pesantren | 852 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | x | x | x | I | x | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 063 | Rumah Sakit | 861 | 8610 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | B1,B2, B3 | x | x | x | x |
| 064 | Puskesmas | 410 | 4101 | 41015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | x | x | x | B1, B3 | x | x |
| 065 | Puskesmas Pembantu | 410 | 4101 | 41015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | x | x | x | B1, B3 | x | x |
| 066 | Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik | 861 | 8610 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | I | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | x | x | x |
| 067 | Posyandu | 861 | 8610 | 86104 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | I | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | x | x | x |
| 068 | Dokter umum | 862 | 8620 | 86201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | T3 | T3 | T3 | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1, B3 | x | x |
| 069 | Dokter spesialis | 862 | 8620 | 86202 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | T3 | T3 | T3 | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1, B3 | x | x |
| 070 | Bidan | 869 | 8690 | 86901 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T3 | T3 | T3 | T3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 071 | Apotek | 477 | 4772 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | I | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | x | x | x |
| | **Fasilitas Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| id_kegiatan | kegiatan | id_KBLI_3digit | id_KBLI_4digit | id_KBLI_5digit | Zona Hutan Lindung | Zona Perlindungan Setempat | Zona RTH | | | | Zona Konservasi | Zona Pertanian | | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Peruntukan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hutan Lindung | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Pemakaman | Jalur Hijau | Taman Wisata Alam | Tanaman Pangan | Perkebunana | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pariwisata | Rumah Kepadatan Tinggi | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kecamatan | Campuran Intensitas Menengah | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | IPAL |
| | | | | | HL | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-7 | RTH-8 | TWA | P-1 | P-3 | PTL | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-2 | C-2 | K2 | K3 | KT | PP | PL-4 |
| 072 | Area bermain / Playground | 931 | 9311 | 93119 | x | x | x | I | x | x | x | x | x | x | I | T3 | T3 | T3 | T1,T2 | x | T3 | T3 | x | x | x |
| 073 | Lapangan Olahraga | 931 | 9311 | 93114 | x | x | x | B2,B3 | x | x | x | B1,B2,B3 | T2, T3 | x | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | I | x | x | x | x | x | x |
| 074 | Gedung Olahraga | 931 | 9311 | 93113 | x | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | x | I | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | I | x | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 075 | Stadion | 931 | 9311 | 93111 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2,B3 | B1,B3 | x | B1,B2,B3 | x | x | x | I | x | x | x | x | x | x |
| | **Peribadatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 076 | Musholla | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | I | I | x | B1,B2,B3 | I | I | I | I | B1,B2,B3 | I | I | I | x | x |
| 077 | Masjid | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | I | I | x | B1,B2,B3 | I | I | I | I | B1,B2,B3 | I | I | I | x | x |
| 078 | Gereja | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | I | I | x | B1,B2,B3 | I | I | I | I | B1,B2,B3 | I | I | I | x | x |
| 079 | Pura | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | I | I | x | B1,B2,B3 | I | I | I | I | B1,B2,B3 | I | I | I | x | x |
| 080 | Klenteng | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | I | I | x | B1,B2,B3 | I | I | I | I | B1,B2,B3 | I | I | I | x | x |
| | **Sosial Budaya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 | Gedung Pertemuan | 410 | 4101 | 41018 | x | x | x | x | x | x | x | B1,B3 | B1,B3 | x | I | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | I | B2,B3 | B2,B3 | B2,B3 | x | x | x |
| 082 | Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan | 410 | 4101 | 41011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1,T3 | T3 | T3 | T3 | x | T1,T3 | I | I | T3 | x | x |
| 083 | Museum | 910 | 9102 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B2,B3 | T2 | x | x | x | x | I | I | I | x | x |
| | **Transportasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 | Terminal Penumpang | 522 | 5221 | 52211 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | x | x |
| 085 | Lapangan parkir | 522 | 5221 | 52215 | x | x | x | T3 | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | I | I | I | I | I | x | x |
| 086 | Halte/Shelther | 522 | 5221 | | x | B1,B2 | x | x | x | x | x | x | B1,B2 | x | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1, B2 | x | x |
| | **Persampahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 087 | **TPS3R** | 382 | | | x | x | x | x | x | x | x | B1,B2,B3 | B1,B2,B3 | x | x | x | x | x | x | x | B1, B3 | x | x | I | B1 |
| 088 | TPS | 381 | | | x | x | x | B1 | x | x | x | B1,B2,B3 | B1,B2,B3 | x | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | x | x | B1, B3 | B1, B3 | x | I | I |
| | **Limbah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 089 | **Pengolahan Limbah B3** | 382 | 3822 | 38220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B1, B3 | x | x | x | x | I | I |
| 090 | **Pengolahan Sampah/Limbah** | 382 | 3822 | 38220 | x | x | x | x | x | x | x | x | B1, B3 | x | B1, B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1, B3 | B1, B3 | x | x | x | I | I |

| id_kegiatan | kegiatan | id_KBLI_3digit | id_KBLI_4digit | id_KBLI_5digit | Zona Hutan Lindung | Zona Perlindungan Setempat | Zona RTH | | | | Zona Konservasi | Zona Pertanian | | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Peruntukan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hutan Lindung | Perlindungan Setempat | Rimba Kota | Taman Kota | Pemakaman | Jalur Hijau | Taman Wisata Alam | Tanaman Pangan | Perkebunana | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pariwisata | Rumah Kepadatan Tinggi | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kecamatan | Campuran Intensitas Menengah | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | IPAL |
| | | | | | HL | PS | RTH-1 | RTH-2 | RTH-7 | RTH-8 | TWA | P-1 | P-3 | PTL | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-2 | C-2 | K2 | K3 | KT | PP | PL-4 |
| 091 | Reservoar Pemadam Kebakaran | 382 | 3822 | 38224 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B3 | B1,B2,B3 | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X | I | I |
| | **Air Minum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 092 | WTP | 432 | 4322 | 43221 | X | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | B1,B3 | X | X | X | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1, B3 | I | I |
| 093 | Reservoar | 360 | | | X | B1, B3 | X | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X | I | I |
| 094 | Intake | 429 | 4291 | 42911 | X | B1, B3 | X | X | X | X | X | I | I | X | T3 | T3 | T3 | T3 | X | X | X | X | X | I | I |
| 095 | Rumah Pompa | 410 | 4101 | 41019 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | **Telekomunikasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 096 | Menara Telekomunikasi | 432 | 4321 | 43212 | X | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | X | X | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | I | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B3 | B1,B2 | X | X | X | X | X |
| 097 | Iklan/reklame | 731 | 7310 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1,T2,T3 | X | X | X | T1,T2,T3 | T1,T2,T3 | T1,T2,T3 | T1,T2,T3 | T1,T2,T3 | X | X |
| 098 | Gardu Listrik | 351 | 3511 | 35115 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1 | B1 | I | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X |
| 099 | Pembangkitan Listrik | 351 | 3511 | 35111 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B3 | B1, B3 | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | **Ruang Terbuka Hijau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **100** | **Jalur hijau** | 813 | 8130 | | X | X | I | I | I | I | X | X | X | X | I | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | X |
| 101 | Taman kota | 932 | 9321 | 93211 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B3 | B1,B2,B3 | X | I | I | I | I | X | X | X | X | X | X | X |
| 102 | TPU (Tempat Pemakaman Umum) | | | | X | X | X | X | I | X | X | T3 | T3 | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X |
| 103 | Pekarangan | 431 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X |
| | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Pertanian lahan basah | 012 | | | X | B1 | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | B1,B2,B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 105 | Pertanian lahan kering | 012 | | | X | B1 | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | B1,B2,B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 106 | Hortikultura | 012 | | | X | B1 | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | B1,B2,B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 107 | Kolam ikan | 932 | 9324 | 93244 | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 108 | Peternakan | 014 | | | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 109 | Tempat pelelangan ikan | 031 | | | X | B1 | X | X | X | X | X | X | B1,B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B3 | B1,B3 | X | X | X |
| 110 | Tambak | 032 | 0326 | 03261 | X | B1 | X | X | X | X | X | B1 | B1,B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**Keterangan:**

| | |
|---|---|
| T1 = | kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau masyarakat dengan pemerintah Bupati melaui rekomendasi dinas terkait |
| T2 = | kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada intensitas ruang yang terdiri dari KDB, KLB, KDH, Jarak Bebas, Ketinggian Bangunan berdasarkan rekomendasi dinas terkait; dan |
| T3 = | kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada jumlah tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait. |
| B1 = | kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan rekomendasi dinas terkait; |
| B2 = | kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu lintas yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait; dan |
| B3 = | kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan biaya dampak pembangunan (development impact fee) yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait. |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.B
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | KDB Maks. | KLB Maks. | KDH Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lindung** | Hutan Lindung | HL | Hutan Lindung | HL | 10% | 0,1 | 90% |
| | Perlindungan Setempat | PS | Perlindungan Setempat | PS | 10% | 0,1 | 90% |
| | Ruang Terbuka Hijau | RTH | Rimba Kota | RTH-1 | 10% | 0,1 | 90% |
| | | | Taman Kota | RTH-2 | 10% | 0,1 | 90% |
| | | | Pemakaman | RTH-7 | 5% | 0,05 | 95% |
| | | | Jalur Hijau | RTH-8 | 10% | 0,1 | 90% |
| | Konservasi | KS | Taman Wisata Alam | TWA | 10% | 0,1 | 90% |
| **Budidaya** | Pertanian | P | Tanaman Pangan | P-1 | 10% | 0,1 | 90% |
| | | | Perkebunan | P-3 | 10% | 0,1 | 90% |
| | Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL | Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL | 40% | 0,8 | 40% |
| | Pariwisata | W | Pariwisata | W | 70% | 2,8 | 30% |
| | Perumahan | R | Rumah Kepadatan Tinggi | R-2 | 80% | 2,4 | 10% |
| | | | Rumah Kepadatan Sedang | R-3 | 75% | 1,5 | 15% |
| | | | Rumah Kepadatan Rendah | R-4 | 70% | 1,4 | 20% |
| | Sarana Pelayanan Umum | SPU-2 | Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | SPU-2 | 70% | 2,1 | 30% |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | KDB Maks. | KLB Maks. | KDH Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Campuran | C | Intensitas Menengah/Sedang | C-2 | 70% | 1,4 | 20% |
| | Perdagangan dan Jasa | K | Perdagangan Skala WP | K-2 | 80% | 2,4 | 15% |
| | | | Perdagangan Skala SWP | K-3 | 70% | 2,1 | 30% |
| | Perkantoran | KT | Perkantoran | KT | 80% | 2,4 | 15% |
| | Pengelolaan Persampahan | PP | Pengelolaan Persampahan | PP | 60% | 2,4 | 30% |
| | Peruntukan Lainnya | PL | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | PL-4 | 60% | 2,4 | 30% |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.C
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Tinggi Bangunan Maks. (m) | Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m) | | | Jarak Bebas Antar Bangunan (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JAP | JKP | JL | |
| **Lindung** | Hutan Lindung | HL | Hutan Lindung | HL | 4 | - | - | - | - |
| | Perlindungan Setempat | PS | Perlindungan Setempat | PS | 4 | - | - | - | - |
| | Ruang Terbuka Hijau | RTH | Rimba Kota | RTH-1 | 4 | - | - | - | - |
| | | | Taman Kota | RTH-2 | 4 | - | - | - | - |
| | | | Pemakaman | RTH-7 | 4 | - | - | - | - |
| | | | Jalur Hijau | RTH-8 | 4 | - | - | - | - |
| | Konservasi | KS | Taman Wisata Alam | TWA | 4 | - | - | - | - |
| **Budidaya** | Pertanian | P | Tanaman Pangan | P-1 | 4 | - | - | - | - |
| | | | Perkebunan | P-3 | 4 | - | - | - | - |
| | Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL | Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL | 8 | 30 | 30 | 30 | - |
| | Pariwisata | W | Pariwisata | W | 16 | 20 | 14,5 | 10,5 | 10-12 |
| | Perumahan | R | Rumah Kepadatan Tinggi | R-2 | 12 | 20 | 14,5 | 10,5 | 8-10 |
| | | | Rumah Kepadatan Sedang | R-3 | 8 | 20 | 14,5 | 10,5 | 6-8 |
| | | | Rumah Kepadatan Rendah | R-4 | 8 | 20 | 14,5 | 10,5 | 6-8 |
| | Sarana Pelayanan Umum | SPU | Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | SPU-2 | 12 | 20 | 14,5 | 10,5 | 8-10 |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Tinggi Bangunan Maks. (m) | Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m) | | | Jarak Bebas Antar Bangunan (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JAP | JKP | JL | |
| | Campuran | C | Intensitas Menengah/Sedang | C-2 | 8 | 20 | 14,5 | 10,5 | 6-8 |
| | Perdagangan dan Jasa | K | Perdagangan Skala WP | K-2 | 12 | 20 | 14,5 | 10,5 | 8-10 |
| | | | Perdagangan Skala SWP | K-3 | 12 | 20 | 14,5 | 10,5 | 8-10 |
| | Perkantoran | KT | Perkantoran | KT | 12 | 20 | 14,5 | 10,5 | 8-10 |
| | Pengelolaan Persampahan | PP | Pengelolaan Persampahan | PP | 4 | 20 | 14,5 | 10,5 | 4-6 |
| | Peruntukan Lainnya | PL | Instalasi Pengolahan Air Limbah | PL-4 | 4 | 20 | 14,5 | 10,5 | 4-6 |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.D
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL SEKITAR KEK MANDALIKA 2021-2041

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lindung** | Hutan Lindung | HL | Hutan Lindung | HL | a. ruang terbuka<br>b. rambu jalur evakuasi bencana<br>c. pos penjaga hutan |
| | Perlindungan Setempat | PS | Perlindungan Setempat | PS | a. ruang terbuka;<br>b. rambu jalur evakuasi bencana;<br>c. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah; dan<br>d. prasarana dan sarana harus memiliki aksesibilitas berupa jalan masuk yang memudahkan semua orang dan penyandang disabilitas. |
| | Ruang Terbuka Hijau | RTH | Rimba Kota | RTH-1 | a. jalur hijau;<br>b. lampu penerangan;<br>c. tempat sampah;<br>d. rambu jalur evakuasi bencana; dan<br>e. sumur biopori. |
| | | | Taman Kota | RTH-2 | a. jalur pejalan kaki *(sidewalk)*;<br>b. jogging track;<br>c. tempat sampa;<br>d. musholla;<br>e. MCK;<br>f. area parkir;<br>g. sumur biopori; dan<br>h. hidran. |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemakaman | RTH-7 | a. jalur hijau;<br>b. tempat sampah;<br>c. MCK; dan<br>d. area parkir. |
| | | | Jalur Hijau | RTH-8 | a. lampu penerangan;<br>b. tempat sampah;<br>c. rambu jalur evakuasi bencana; dan<br>d. sumur biopori |
| | Konservasi | KS | Taman Wisata Alam | TWA | a. jalur hijau;<br>b. lampu penerangan;<br>c. tempat sampah;<br>d. rambu jalur evakuasi bencana; dan<br>e. sumur biopori. |
| **Budidaya** | Pertanian | P | Tanaman Pangan | P-1 | a. ruang terbuka hijau;<br>b. jaringan irigasi atau prasarana lainnya;<br>c. jalan usaha tani;<br>d. rambu jalur evakuasi bencana; dan<br>e. area parkir. |
| | | | Perkebunan | P-3 | a. ruang terbuka hijau;<br>b. jaringan irigasi atau prasarana lainnya;<br>c. jalan usaha tani;<br>d. rambu jalur evakuasi bencana; dan<br>area parkir. |
| | Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL | Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL | a. ruang terbuka hijau;<br>b. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter<br>c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan<br>e. d. area parkir. |
| | Pariwisata | W | Pariwisata | W | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau; |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |
| | Perumahan | R | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;<br>i. setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. |
| | | | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;<br>i. setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. |
| | | | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | i. setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. |
| | Sarana Pelayanan Umum | SPU | Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan | SPU-2 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; |
| | Campuran | C | Intensitas Menengah/Sedang | C-2 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap;<br>h. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan<br>i. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |
| | Perdagangan dan Jasa | K | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 5 (lima) persen (lima persen) dari luas Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP;<br>d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>e. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>f. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>h. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestic sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (system off site); dan<br>j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |
| | | | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 5 (lima) persen (lima persen) dari luas Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP;<br>d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>e. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>f. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>h. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap;<br>i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestic sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (system off site); dan<br>j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |
| | Perkantoran | KT | Perkantoran | KT | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau; |

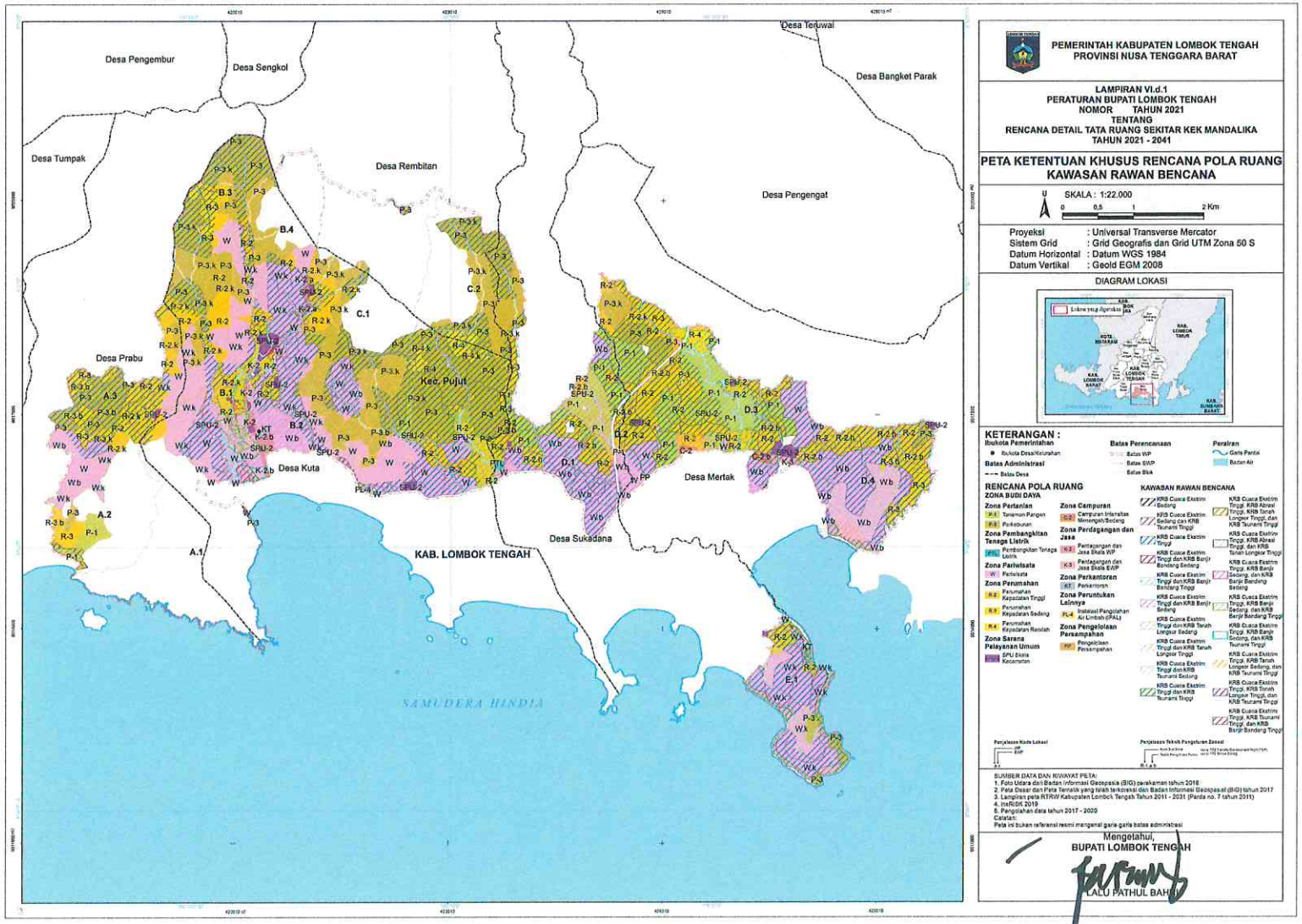
| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |
| | Pengelolaan Persampahan | PP | Pengelolaan Persampahan | PP | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |

| Zona Dasar | Zona | Kode Zona | Sub Zona | Kode Sub Zona | Sarana dan Prsarana Minimal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Peruntukan Lainnya | PL | Instalasi Pengolahan Air Limbah | PL-4 | a. jalur pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;<br>b. ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RW dan RT;<br>c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir;<br>d. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;<br>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;<br>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;<br>g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan motor angkut sampah berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tetap; dan<br>h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. |

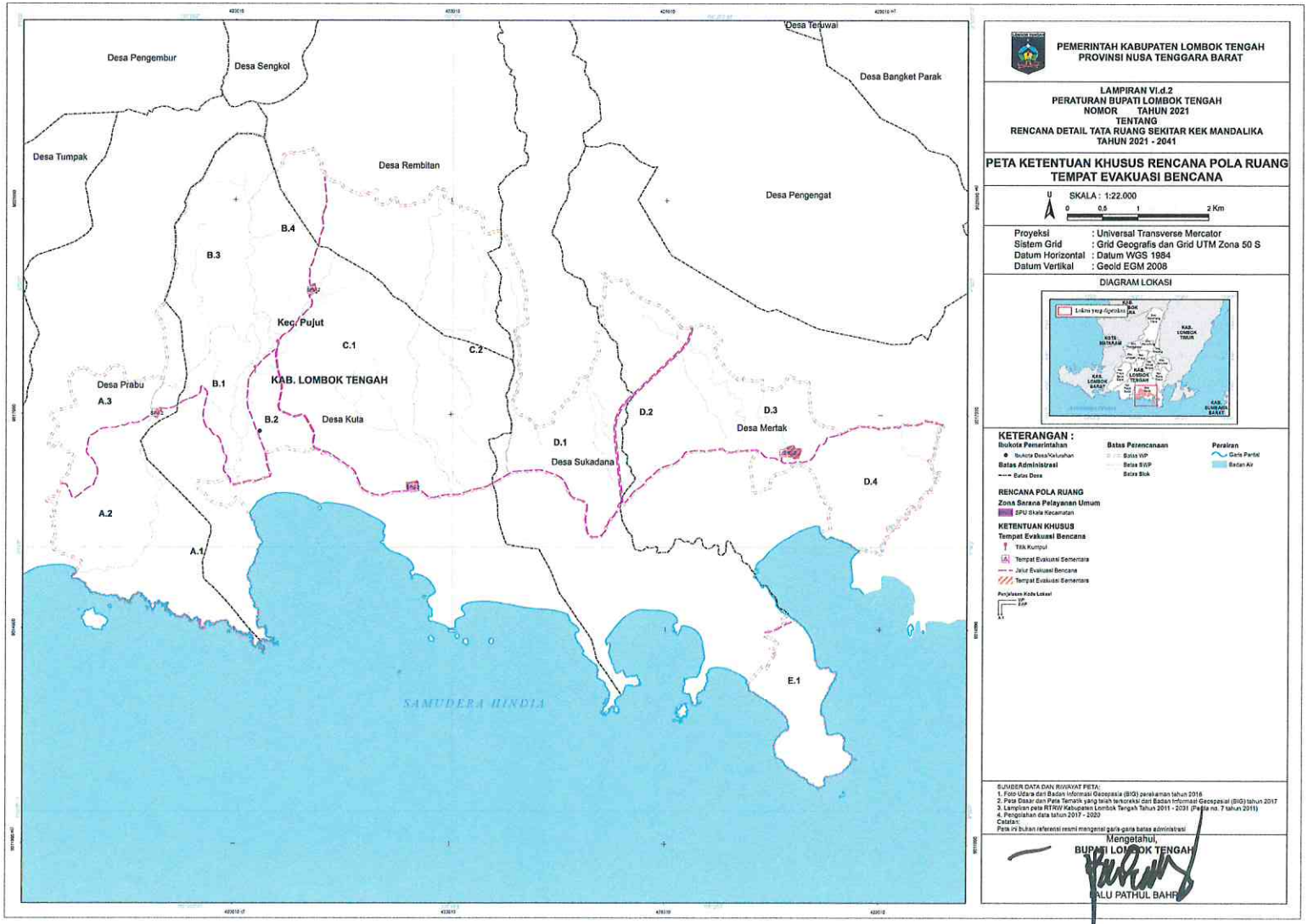
BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VI.D.1
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN VI.D.2
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN VI.D.3
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KEK MANDALIKA TAHUN 2021-2041

